

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 22, 23, DAN 29 NOVEMBER 2017



TENTANG RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (I)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

Hari : SELASA
Tanggal : 22 November 2016
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2017;
3. Skors (untuk penyusunan pemandangan umum fraksi)
4. Penyampaian pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
5. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 35 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 10 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikumWr. Wb.

- Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan
Camat se Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan para
undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembahasan Raperda

tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 dengan keadaan sehat wal afiat.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, permohonan maaf kami sampaikan yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang ada di sini atas kurang nyamanan terhadap tempat di gedung DPRD ini, oleh karena kondisi gedung masih dalam kondisi perbaikan.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 sangat erat hubungannya dengan KUA-PPAS Tahun 2017, yang mengacu pada Undang-Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. Hal ini tercermin dalam rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan, baik menyangkut kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Rapat Paripurna ini merupakan rapat paripurna pertama dari tiga rapat paripurna yang diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam rapatnya pada tanggal 21 November 2016, untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Mudah-mudahan hingga selesai nanti, pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 ini dapat berjalan lancar serta selalu memperhatikan kondisi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Rembang pada khususnya. Amiin.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Amanat Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa *“Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD”*.

Berdasarkan catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 35 orang.

Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucap "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 12.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,
Sebelum berlangsung lebih lanjut, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati Atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
3. Skors (untuk penyusunan pemandangan umum fraksi)
4. Penyampaian pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
5. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua yaitu "*Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017*".

Kepada Saudara Bupati Rembang kami persilahkan.

**=== PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA APBD
KABUPATEN REMBANG T.A 2017 ===**

- *(Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 terlampir)*

Terima kasih Saudara Bupati atas penjelasannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Acara selanjutnya yaitu Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017. Oleh karena pemandangan umum fraksi ini memerlukan waktu dalam penyusunannya, maka rapat paripurna saya skors selama 60 (enam puluh) menit.

(*Ketuk palu 1 kali*)

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Sehubungan waktu yang diberikan kepada fraksi-fraksi dalam menyusun Pemandangan Umum telah habis, maka skors saya cabut dan tepat pukul 14.10 WIB rapat paripurna kita lanjutkan kembali.

(*Ketuk palu 1 kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Kita masuki acara keempat yaitu Penyampaian pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Agar dalam penyampaiannya berjalan dengan tertib, kepada Saudara-saudara anggota Fraksi yang ditunjuk untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, saya persilahkan menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Zaimul Umam NS
2. Fraksi Partai Demokrat : Sdri. Hj. Hikmah Purnamawati
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdri Nanik Sri Sundari

5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr. Puji Santoso, S.P.M.H.
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. Gatot Paeran, S.H.Msi.
7. Fraksi Harapan : Sdr. Paramita Prapanca ANR

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sampai dengan Fraksi Harapan, secara berurutan saya persilahkan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

===== **PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI** =====

➤ *(Pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 terlampir)*

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Dengan telah disampaikannya penjelasan Bupati maupun pemandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 maka selesailah acara rapat paripurna pada hari ini.

Kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan terimakasih kepada Saudara Bupati, Anggota Forkompinda, Anggota DPRD dan seluruh hadirin dan undangan yang telah memberikan perhatian dan dukungannya sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar.

Akhirnya, dengan mengucap "*Alhamdulillahirobbil 'alamiin*" tepat pukul 14.55 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

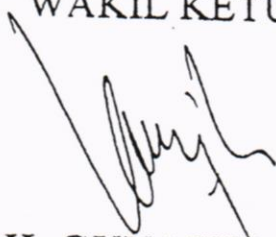
Untuk Rapat Paripurna Kedua dengan agenda pokok Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 akan dilaksanakan besok pagi tanggal 23 November 2016.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

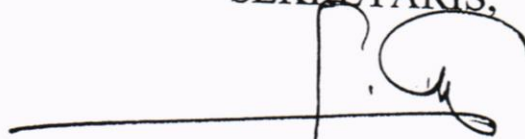
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,



H. GUNASIH, S.E.

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda
APBD Tahun Anggaran 2016;
- LAMPIRAN III : Pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang
APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2017.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD KAB. REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SELASA, 22 NOVEMBER 2016

PUKUL : 11.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MUHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

NO	NAMA	JABAT	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, S.P, M.H	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41	
FRAKSI HARAPAN				
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

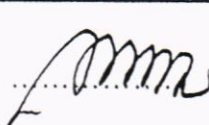
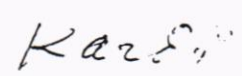

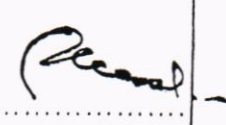
DPRD KABUPATEN REMBANG
KETUA

H. GUNASIH, S.E

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD T.A 2017

HARI : SELASA , 22 NOVEMBER 2016

PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.....
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.....
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.....
5	Dandim 0720 Rembang	5.....
6		Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.....
8	Ir. HARI SUSANTO,M.Si	Pj Sekertaris Daerah	8. 



SEKRETARIAT DPRD KAB. REMBANG

ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD T.A 2017**

HARI : SELASA , 22 NOVEMBER 2016
PUKUL : 11.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	KURPIANOMO	1
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOCH	2
3	CAMAT SUMBER	HERIYONO	3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU	SUSKATI TORO	5
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE	Kusmad	8
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR	Juhanto	10
11	CAMAT SEDAN	M. R. Dyantri	11
12	CAMAT SLUKE	Agus Subioto	12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG	Eddy Kuswanto	14



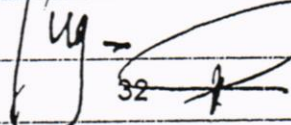
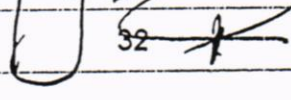
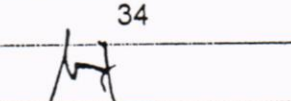
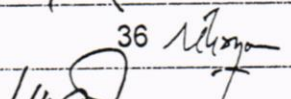
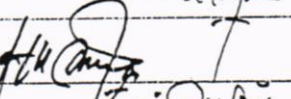
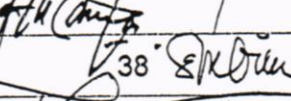
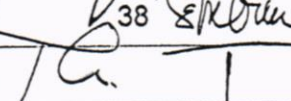
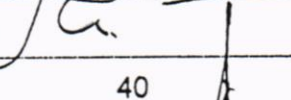
KABUPATEN REMBANG
DPRD KAB. REMBANG

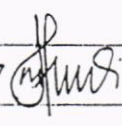

Drs. CHMAD MUALIF
19620804 198803 1 011



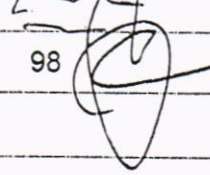
**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD T.A 2017**


HARI : SELASA , 22 NOVEMBER 2016
PUKUL : 11.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Non Effendi	SAB	1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI	Kartono	SAB	3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA	Subanti	AIC	5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Ahmad		8
9	BAG. HUKUM	Eddy Djoko P		9
10	BAG. HUMAS	Johan W		10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Eantoro		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Iri Iri H		15
16	BAG. UMUM	Samudra	Um	16
17	DPPKAD	Muhammad	K	17
18	INSPEKTORAT	Djoko P.	Selverain	18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	Dwi Wahyuni	ka	20
21	B K D	Supriyanti	ke.DKB	21
22	BKP & P4K	Non Hidayati	Kambang Keri	22
23	B P B D	Ambar	Sel	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM			24
25	DINAS KESEHATAN	Nurani	Kej.Kabari	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Non Effendi	Plt Kabins	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Mukti	Kopi	27
28	DINTANHUT	Suratman		28
29	DINLUTKAN	Zusri	Kusri	29
30	DISHUBKOMINFO	Egfan		30

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	MUGROMO	Sejawah	31 
32	DINSOSNAKERTRANS	Dari Martopo	Katid Bnd days	32 
33	DINBUDPARPORA			33
34	DINAS ENERGI & SDM			34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Purnomo's	ka	35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTOONO	ka	36 
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Gusriana		37 
38	KANTOR KPPT	Ety Purbiyanti		38 
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Febiano		39 
40	SATPOL PP	Street Pgt	Korps polp	40 
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM	Masudi	Reporter	87 
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95		Agn W		95 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	dr Kurniati. /DKK.	dr Kurniati.	Kaha Taula & Faruq	96 
97	H. MUNGICIH	HR		97 
98	LSM SEMUT ARANG.	SUPRENO BUSNO	Utua	98 
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124
125				125


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
Drs. AHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011



P E N G A N T A R
N O T A K E U A N G A N

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN
2017



BUPATI REMBANG

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM, Rekan Media dan tamu undangan yang berbahagia.

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, kita dapat menghadiri rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Di kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Legislatif atas berbagai masukan yang telah diberikan selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 dan akhirnya telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Insya Allah, apa yang kita usahakan bersama ini bermanfaat bagi pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.

Tujuan utama Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah Memperkuat Sinergitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah untuk Pengembangan Potensi Wilayah, serta pemenuhan Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna Perwujudan Pemerintahan yang Amanah.

Pembahasan RAPBD ini diharapkan tetap dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif guna mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Beberapa perubahan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 telah kita tampung yaitu sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 juga disusun berdasarkan komitmen dan ketaatan kita terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Kebijakan Penganggaran Pendapatan Daerah dalam RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan telah memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Sedangkan untuk Penganggaran yang bersumber dari :

- Dana Transfer Khusus yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih belum masuk dalam RAPBD Kabupaten Rembang TA. 2017, sambil menunggu informasi Resmi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2017 Pendapatan Daerah direncanakan mencapai Rp.1,55 Trilliun. Jumlah ini turun 0,9 persen dari target pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2016 sebesar Rp.1,64 Trilliun.

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp.1,55 Trilliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp.215,40 Milyar turun 1,09 persen dari target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.217,79 Milyar.

2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konruen yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar masyarakat dan urusan pemerintahan pilihan. Program dan kegiatan memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2017 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang berupaya terus meningkatkan kualitas belanja daerah secara menyeluruh. Total belanja daerah sebesar Rp.1,73 Trilliun, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.1,09 Trilliun dan Belanja Langsung sebesar Rp.632.97 Milyar.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 untuk **Bidang Pendidikan**, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan **20% lebih** dari belanja daerah. Dalam RAPBD Kabupaten Rembang TA. 2017 Belanja Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan) sebesar Rp.580,35 Milyar, atau **33,52%** dari Total Belanja Daerah. Demikian juga untuk **Bidang Kesehatan**, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal **10%** dari total belanja APBD di luar gaji. Dalam RAPBD Kabupaten Rembang TA. 2017 Belanja Bidang Kesehatan

tidak termasuk belanja gaji PNSD (Dinas Kesehatan, BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD DR. Soetrasno) sebesar 160,62 Milyar, atau **25,3 %** dari Total Belanja diluar Belanja Gaji.

3.. Pembiayaan Daerah :

Pengeluaran pembiayaan dalam RAPBD TA 2017 untuk penyertaan modal Daerah sebesar Rp.6,19 Milyar.

Berikut kami sampaikan ringkasan Rancangan PERDA tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 :

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN DAERAH	1.554.122.538.366
Pendapatan Asli Daerah	215.400.264.155
Pendapatan Pajak Daerah	45.678.500.000
Hasil Retribusi Daerah	21.133.688.500
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.215.000.000
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.373.075.655
Dana Perimbangan	1.076.782.032.211
Dana Transfer Umum	881.428.491.211
Dana Transfer Khusus	195.353.541.000
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	261.940.242.000
Hibah	1.566.904.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	81.510.000.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	178.863.338.000
BELANJA	1.731.069.268.368
Belanja Tidak Langsung	1.098.095.502.721
Belanja Pegawai	735.747.865.000
Belanja Bunga	-
Belanja Hibah	30.015.835.500
Belanja Bantuan Sosial	11.525.000.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.455.961.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	313.350.841.221
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
Belanja Langsung	632.973.765.647
Belanja Pegawai	159.870.956.976
Belanja Barang dan Jasa	200.469.614.229
Belanja Modal	272.633.194.442
SURPLUS / (DEFISIT)	(176.946.730.002)
PEMBIAYAAN DAERAH	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	183.136.730.002
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	183.136.730.002
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.190.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.190.000.000
Pembayaran Pokok Utang	-
PEMBIAYAAN NETTO	176.946.730.002
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-

Hadirin Sidang Dewan yang Saya Hormati,

Demikian telah kami sampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, Saya berharap untuk segera dibahas secara mendalam, obyektif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 ini dapat ditetapkan sesuai tahapan penganggaran selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 22 Nopember 2016

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

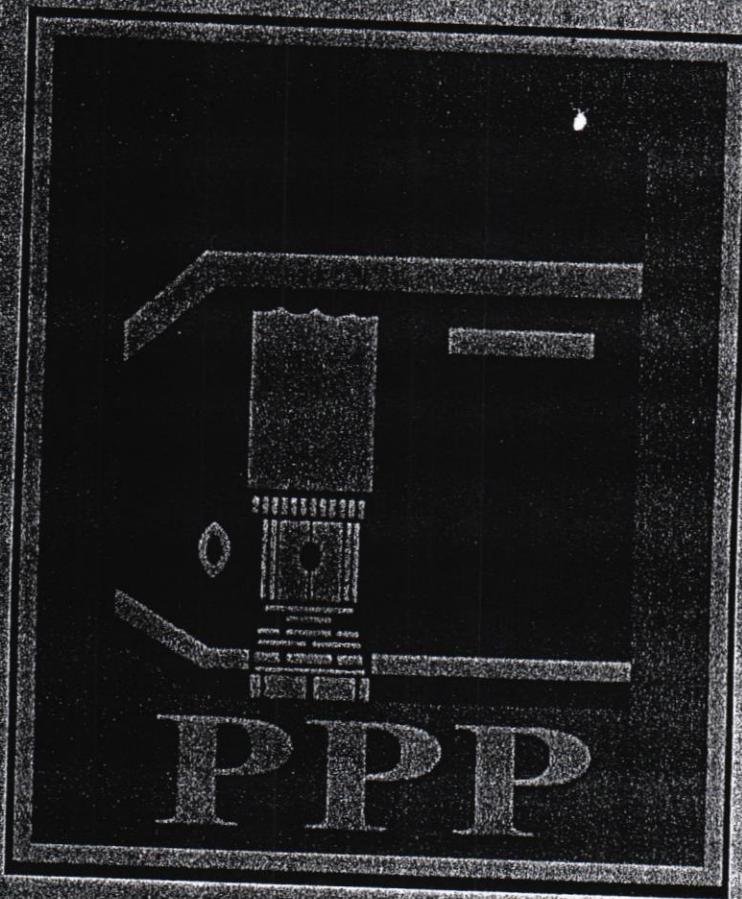
PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KABUPATEN REMBANG

ATAS

RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Hari : Selasa, 22 Nopember 2016
Dibacakan Oleh : ZAIMUL UMAM NS**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212 Rembang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2017

Selasa , 22 Nopember 2016

Dibacakan oleh : MOHAMMAD ANSHORI, SH.

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

Bismillah., Alhamdulillah., Assholatu Wassalamu a'la Rosulilla., Wa'alaalihi wasohbihi wamawwalah., laahaula wala quwwata illabillah..., Amma ba'da.....

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.

=> sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita, tak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna ini , dalam keadaan sehat Wal afiat tidak kurang suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW, para shahabat, beserta seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati....,

Mengawali penyampaian Pemandangan umum kami , terhadap Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Rembang tahun 2017, yang paparan dan penjelasannya telah disampaikan oleh sdr. Bupati, dalam rapat paripurna, beberapa puluh menit yang lalu , pada hari Selasa ini juga , tanggal 22 Nopember 2016, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang , terutama kepada TAPD , yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Raperda tentang APBD tahun 2017 ini , dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan , sehingga dapat segera untuk dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup , terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2017 ini, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam Pemandangan Umum ini, menyampaikan beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, untuk dijadikan bahan pertimbangan, didalam pelaksanaan pembahasan , antara lain :

1. Sesuai dengan instruksi Presiden, bahwa untuk menjaga stabilitas pembangunan di daerah, diminta agar Pemda selalu berkoordinasi dan bersinergi bersama Forkopimda dengan pihak APH.
2. Pemerintah Daerah diminta, harus segera melaksanakan program kegiatan Tahun Anggaran 2017 lebih awal, secara cepat, terbuka dan transparan, setelah semua ada landasan dasar hukumnya, Agar harapan masyarakat dapat terpenuhi.
3. Berkenaan dengan Dana desa yang cukup besar, agar pelaksanaan program pembangunan desa dan Administrasi sesuai harapan pemerintah, Mohon agar Pemkab. Rembang melakukan, monitoring, pembinaan dan pengawasan rutin kepada pemerintahan Desa.
4. Pelaksanaan Pilkades tinggal sisa waktu 8 hari, agar di dalam pelaksanaan nanti tetap kondusif, aman, lancar dan damai, kami mohon agar Pemkab, bersama Forkopimda, tetap meningkatkan komunikasi / koordinasi yang lebih intensif, terhadap jajarannya sampai ditingkat kecamatan dan desa.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017 ini , dan selanjutnya segera untuk dilakukan pembahasan. Semoga kita selalu diberikan petunjuk , kemudahan, dan kelancaran, sehingga apa yang kita kerjakan mandapatkan hasil yang maksimal, dan manfaat , untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 22 Nopember 2016

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

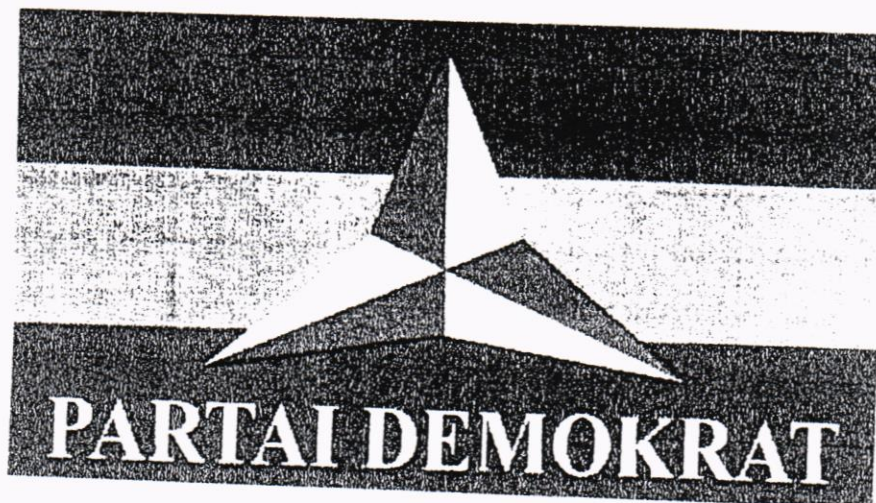

SUGIHARTO



SEKRETARIS


ZAIMUL UMAM NS

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
RAPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Rembang, 22 NOPEMBER 2016
Dibacakan oleh : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
RAPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

SELASA, 22 NOPEMBER 2016

Dibacakan oleh : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, keselamatan lahir dan batin, sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan

umum fraksi atas Raperda APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2017.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan kami anjurkan sebagai bahan masukan demi kebaikan Rembang yang kita cintai, antara lain :

1. Secara umum pembangunan di Kabupaten Rembang pada tahun 2016 pelaksanaannya masih banyak yang belum terserap karena pihak-pihak pengambil keputusan, dalam hal ini SKPD tidak mau melaksanakan karena takut, jadi timbul kesan di masyarakat bahwa dapat gaji tiap bulan akan tetapi takut bekerja. Untuk itu kami dari Fraksi Demokrat meminta jaminan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang bahwa pembangunan dan anggaran tahun 2017 terserap dengan baik, karena yang terjadi selama ini hanya sebatas pembahasan dalam rapat-rapat akan tetapi hasilnya tidak bisa direalisasikan.
2. Pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2016 terkesan tidak siap SKPDnya karena kegiatannya MBENDOL MBURI (banyak yang di akhir tahun)
3. Masih banyaknya konsultan perencana dan SKPD dalam merencanakan kegiatan tidak berkoordinasi dengan desa sehingga outputnya tidak dapat tepat sasaran dan tidak bisa sesuai harapan masyarakat. Contoh breakwater desa Kragan kec kragan ada kegiatan dengan nilai 800 juta rupiah hanya dapat bangunan sepanjang 25 meter. Sehingga masyarakat kanan kiri bangunan pada resah karena gelombang pasang mengarah ke kanan kiri bangunannya.
4. Kami mohon segera di berikan kebijakan terkait dengan banyak guru guru di SD yang kurang bahkan ada dalam satu SD hanya ada 2 guru PNS, di UPT kec sarang kurang 105 guru kec kragan

kurang 73 guru, kec. Sluke kurang 62 guru dan UPT yang lain juga banyak.

Sehingga akan menghambat proses belajar mengajar.

5. Mohon RBSJ segera untuk menyetorkan devidennya kalau sampai dengan tahun 2017 nanti belum ada kami mohon untuk segera di pihak ke tigakan serta asset tanah yang tidak produktif supaya segera di jual saja.
6. Mohon agar bupati memanggil pihak bulog terkait beras untuk raskin yang sangat tidak layak konsumsi, bahkan terindikasi beras bulog muter saja, dari penerima dijual ke pedagang, dari pedagang dijual lagi ke bulog kembali.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

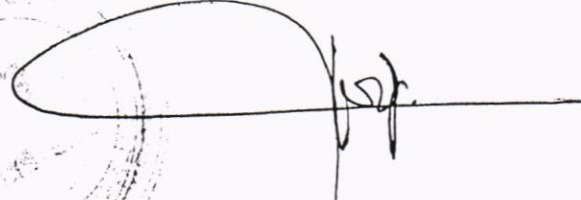
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 22 Nopember 2016

FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS



EKA SISWA KARTIKA

IMRO'ATUN SOLICHAH, S.E., M.H.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2017

disampaikan oleh : *ILYAS*

Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Selasa 22 November 2016



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Nilai Benar

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2017

disampaikan oleh : *ILYAS*

Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Selasa 22 November 2016

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Saudara Pj. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Kepala dinas, kantor, bagian, camat-camat, Kawan-kawan pers, pimpinan partai politik, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah SWT , berkat nikmat-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna tentang Raperda APBD 2017 Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulalloh Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda APBD 2017, Demikian pula kepada saudara Bupati diucapkan banyak terima kasih atas disampaikannya Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kami FPKB juga memohon dengan sangat kepada saudara bupati agar dalam memberikan bahan/materi Raperda tentang APBD tidak mepet atau minimal 2 minggu sebelum pembahasan agar kita dalam pembahasan dan menyampaikan pandangan umum fraksi lebih matang. Namun ada kekecewaan di hati kami, pada saat Bupati membacakan pengantar nota keuangan tersebut pada sidang paripurna DPRD, banyak sekali SKPD dan camat yang tidak hadir. Kami minta agar Bupati memberikan teguran kepada camat dan pimpinan SKPD yang mendapatkan undangan namun tidak menghadirinya. Apalagi dalam sidang paripurna terkait APBD 2017. Marilah kita jadikan rapat paripurna DPRD yang terhormat ini sebagai ajang silaturahmi yang mampu menyelesaikan misinformasi/ komunikasi antara legislative dan eksekutif.

Pimpinan sidang dan Hadirin yang berbahagia

Sebelum kami menyampaikan Pemandangan Umum fraksi ijin kami mengucapkan selamat Hari Perhubungan Darat yang diperingati pada hari ini 22 Nopember , dengan diperingati Hari Perhubungan Darat ini kami berharap Dinas Perhubungan bisa menorehkan prestasinya dengan menertibkan truck yang selama ini parkir di pinggir-pinggir jalan yang selama ini banyak mengganggu pemakai jalan yang lain sehingga banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.

Hadirin Yang Kami Muliakan

Menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa Raperda APBD 2017 hendaknya mencerminkan dan disesuaikan dengan Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan harapan agar SKPD yang baru dapat menjalankan program dan kegiatannya secara maksimal, Selain itu, dalam melakukan penyesuaian atas KUA PPAS terhadap Perangkat Daerah yang baru harus lebih berhati-hati agar tetap terjaga pemenuhan target sasaran dan capaian pembangunannya sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD.

Bahwa dalam proses pembahasan KUA PPAS ditingkat banggar dan komisi diketahui terjadi penurunan anggaran hampir di semua SKPD, sehingga perlu penjelasan dari TAPD bukankah justru hal ini akan menimbulkan gejala dilematis. Sebab disatu sisi dinas dituntut sigap untuk bekerja, tapi disisi lain TAPD tidak memberikan anggaran yang cukup, bagaimanakah ini bisa terjadi ? malah anggaran DPRD juga terkena rasionalisasi. seharusnya ini tidak boleh terjadi. Jangan ada dusta diantara kita.

Pada sector pendapatan daerah, salah satunya ditopang dari BUMD, RBSJ dan lainnya. Khusus RBSJ Rembang yang awal berdirinya didanai APBD sebesar 35 M yang bertujuan untuk meningkatkan PAD dan berkontribusi besar pada pemkab Rembang. Tapi ternyata sampai hari ini belum bisa memberikan deviden sama sekali. Bahkan ketika kita cek dilapangan pada dinas terkait, RBSJ mengalami kerugian. Ini aneh karena RBSJ mempunyai beberapa usaha diantaranya bidang pertanian, pertambangan dan mempunyai POM bensin yang secara rasional tidak mungkin mengalami kerugian. Ada apakah ini? Kalau memang ternyata keberadaan RBSJ tidak sesuai dengan tujuan awal didirikannya, maka FPKB merekomendasikan agar RBSJ ditutup saja.

Terkait dengan prioritas pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat tema yang diangkat terlalu luas. Menurut kami, hendaknya lebih focus dalam menentukan skala prioritas terutama pada bidang infrastruktur jalan poros antar Desa dan antar Kecamatan. Sehingga, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dapat terwujud, Karena jalan adalah aspek paling penting dalam mengerakkan roda perekonomian.

Selanjutnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun Raperda yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Daerah dan Kawasan Obyek Wisata dapat dikelola dengan baik. Pemkab juga harus melakukan evaluasi atas Perda yang memberatkan masyarakat, misalnya perda tentang nelayan. Fraksi Kebangkitan Bangsa juga mengharapkan ada alokasi anggaran untuk Tenaga Harian Lepas, organisasi-organisasi kemasyarakatan, Kesejahteraan Tenaga/Guru madin dan Lembaga Pendidikan Islam.

Sementara, terhadap Rancangan APBD, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa hal diantaranya, proyeksi target Pendapatan Daerah, upaya perencanaan yang lebih akseleratif dalam meningkatkan proyeksi pendapatan dan Makro Ekonomi.

Terkait Belanja Daerah, Fraksi Kebangkitan Bangsa menanyakan apakah Belanja langsung sebesar Rp. 632.973.765.647 yang proporsinya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal apakah sudah proporsional? sebab kami melihat ternyata porsi belanja pegawai atau honor pegawai masih terlalu tinggi, tidak sebanding dengan belanja modal yang telah diberikan. Yang idealnya antara belanja pegawai dan belanja modal tidak boleh lebih dari 6% sehingga efek domino bisa dirasakan masyarakat Rembang secara umum, Mengingat selain ada kewenangan yang sudah diambil oleh propinsi dan pusat, Organisasi Perangkat Daerah yang baru harus menyesuaikan dengan proporsi anggaran.

Sidang dewan Yang Kami Mulyakan

Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan dan atas perhatian semua pihak kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Rembang, 22 November 2016

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa



Muhammad Imron
Ketua

Ilyas
Sekretaris



FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Tanggal : Nopember 2016

TENTANG : RAPERDA APBD 2017

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) Kab. Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag di lingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Para Tamu Undangan yang Berbahagia.

Yang Terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang beserta jajaran dan staf,

Dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang hadir pada sidang hari ini yang kami hormati

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur ke hadirat ALLAH SWT atas nikmatnya lah kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam menyampaikan pemandangan umum atas Raperda APBD tahun anggaran 2017 kali ini kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, diantaranya :

1. Untuk Dinas Pekerjaan Umum untuk lebih mempersiapkan diri dalam menerima anggaran sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan rencana anggaran.
2. Dalam SKT, lampiran Perbup untuk Hibah dan Bansos dapat mengcover semua elemen masyarakat sehingga proses Hibah Bansos dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Kami prihatin dengan berkurangnya anggaran di masing-masing dinas, dimana anggaran itu sangat berfungsi sekali, contohnya dana pendampingan sampai monev dengan berkurangnya anggaran akan mempengaruhi kualitas dan kinerja pelayanan dalam proses pembangunan dan kemajuan di Kab. Rembang.
4. Kami mendorong agar Pemkab Rembang melakukan pemutakhiran data ulang bagi penerima BPJS pusat maupun KIP, karena selama ini data yang dipakai masih menggunakan data yang lama sehingga banyak yang kurang tepat sasaran.
5. Untuk meningkatkan kinerja Tenaga Harian Lepas (THL) kami berharap Pemkab bisa merealisasikan honor untuk tenaga harian lepas ini di semua dinas terkait sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem kami buat, semoga berguna dan manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf.

Billahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu alaikum wr. Wb.

MERDEKA!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



KETUA


JASMANI

SEKRETARIS


ALLIRCHAM ST

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

**RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017**



REMBANG, 22 NOVEMBER 2016

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

Disampaikan oleh puji santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 22 November 2016

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;
Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri
Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI
Yang kami hormati Sdr. Pj. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat dilingkungan
Pembkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;
Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas,
Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali kalimat pembuka, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Ke 2 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun 2017 dengan baik dan lancar, semoga apa yang telah kita kerjakan ini menjadikan amal dan ibadah yang bermanfaat.

Selanjutnya sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rosullullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Rembang mengucapkan Selamat Hari Anak-anak sedunia, yang jatuh

pada tanggal 20 November. Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak dan memberikan hak bagi anak-anaknya agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Jaya dan Runtuhnya sebuah bangsa dan negara ada di tangan anak-anak.

Sehubungan dengan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Fraksi Gerindra mendasar dari kepentingan masyarakat Kabupaten Rembang akan memberikan beberapa catatan-catatan kritis sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Postur anggaran dalam pos Pendapatan Asli Daerah/ PAD bahwa angka yang dipatok oleh Pemerintah daerah terlalu rendah dan kurang maksimal yaitu sebesar 215 M. Angka ini lebih rendah dari PAD tahun 2016 yaitu sebesar 217 M. Padahal pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang meningkat hampir mendekati angka 6 persen dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara nasional ditahun 2017. Logikanya ketika pertumbuhan ekonomi naik, maka pendapatan juga pasti naik. Mohon penjelsannya!
2. Terkait piutang pajak dalam catatan BPK yang mencapai angka 29 M, kenapa Pemerintah Kabupaten Rembang tidak berani memasukan dalam potensi Pendapatan. Mohon Penjelasan!
3. Prediksi Silpa yang diperkirakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang terlalu rendah yaitu di angka 183 M. Padahal fakta dilapangan banyak kegiatan di APBD 2016 yang tidak bisa dilaksanakan. Pemerintah harus segera mendata ulang semua kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, sebagai tambahan dana untuk melaksanakan Pembangunan di tahun 2017. Mohon penjelasan!
4. Terkait dengan Belanja Pegawai pada postur RAPBD tahun 2016 ini yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Belanja pegawai pada Pos Belanja Tidak Langsung di catat angka 735 M, sedangkan pada APBD Tahun 2016 Cuma 705 M. Kami mempertanyakan hal itu, mohon penjelesan! Padahal sejak akhir tahun 2009 Pemkab terakhir kali menambah jumlah Pegawai Negri Sipil dan seiring berjalannya waktu tentu banyak pula Pegawai-pegawai yang telah pensiun. Berapa jumlah PNS yang pensiun sejak tahun 2010 sampai sekarang?
5. Pemerintah Kabupaten Rembang harus lebih peduli dan memperhatikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh aparatur pegawainya. Kami

mengharapkan ada perubahan etos kerja yang lebih baik di Tahun 2017 yang akan datang. Pemkab harus melaksanakan evaluasi kinerja keseluruhan aparaturnya, beban kerja pegawai yang sesuai porsinya sehingga program dan kegiatan bisa berjalan lancar serta pembangunan bisa dinikmati oleh masyarakat.

6. Pesta demokrasi PILKADES yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2016 secara serentak, untuk menghindari botoh dan money politik yang merajalela khususnya di daerah rawan seperti desa Mojowarno kecamatan Kaliorejo, Pemkab harus berkoordinasi dengan kepolisian dan Aparat penegak Hukum lainnya mulai sekarang sampai hari H pelaksanaan Pilkadaes untuk memonitor dan menerjunkan petugas-petugas langsung di desa-desa yang disinyalir rawan. Sehingga tidak menodahi pesta demokrasi.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Teriring doa dan semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hikmah, dan tepat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang. Amiin Ya Robbal alamiin..

Billahitaufig wal hidaayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 22 Nopember 2016

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG


H. CHASANNUDIN

Wakil Ketua




PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang - Tahun Anggaran 2017

Disampaikan dalam
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Hari Selasa, 22 Nopember 2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi Karya Sejahtera mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT seraya memanjatkan doa agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan kepada kita semua.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Pada kesempatan ini Fraksi Karya Sejahtera akan menyampaikan Pemandangan Umum mengenai Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 yang baru saja disampaikan oleh Saudara Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang, sbb.

- Asumsi target pendapatan masih sangat normatif, belum menunjukkan terobosan inovatif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
- Dalam hal anggaran belanja, belum ada rumusan tentang kebijakan untuk meningkatkan serapan anggaran setiap SKPD sehingga kegiatan-kegiatan dikhawatirkan tidak berjalan secara efektif.

- Kebijakan Bantuan Keuangan Desa belum cukup fokus dan terarah. Apa indikator dan prioritas pembangunan desa di Kabupaten Rembang tahun 2017 nanti. Bagaimana penguatan Pemerintahan Desa, infrastruktur desa, BUM Desa dll.
- Rumusan kebijakan belanja langsung belum berkaitan erat dengan 12 Prioritas Pembangunan tahun 2017, sebagai pengejawantahan Visi dan Misi Bupati. Juga belum menyentuh problem mendasar belanja langsung Kabupaten Rembang yang alokasi dan realisasinya kurang produktif. Efisiensi dan efektifitas belanja pegawai (honorarium dan upah) dan jenis belanja barang dan jasa serta minimnya alokasi dan realisasi belanja modal.
- Pada RAPBD TA 2017 terdapat SILPA sebesar Rp. 183.136.730.002,- (seratus delapan puluh tiga milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua rupiah). , belum termasuk anggaran pada APBD Perubahan 2016 yg tidak bisa berjalan. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen SKPD dalam melaksanakan pembangunan kurang optimal, sehingga berpengaruh pada jalannya pembangunan dan berdampak pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.
- Secara umum pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang pada tahun 2016 ini kurang dari 50 %. karena para pemangku tugas (SKPD) tidak mau atau takut melaksanakannya, kecuali pada pelayanan fungsional seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kesan di masyarakat para birokrasi makan “gaji buta” tiap bulan menerima gaji tetapi tidak bekerja. Pada kesempatan ini kami minta jaminan, apakah yang Saudara Bupati berikan kepada rakyat agar APBD TA 2017 nanti terserap dengan baik.

Yang terhormat Saudara Bupati

Setelah mendengarkan Pengantar Nota Keuangan RAPBD yang disampaikan oleh Saudara Bupati tadi, Fraksi Karya Sejahtera melihat adanya inkonsistensi antara Nota Keuangan dengan RAPBD-

nya, yakni dalam Nota Keuangan tertulis: Penganggaran yang bersumber dari Dana Transfer Khusus yaitu Dana Alokasi Khusus; Bantuan Keuangan dari Pemprov Jawa Tengah masih belum masuk dalam RAPBD Kab Rembang TA 2017, sambil menunggu informasi resmi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Namun dalam RAPBD telah tertera Dana Transfer Khusus sebesar Rp. 195.353.541.000,- (seratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

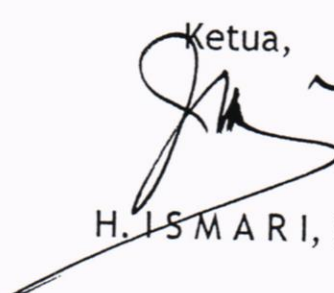
Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.


Untuk kesekian kalinya dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPRD Kabupaten Rembang bersama Pemkab Rembang harus bekerja keras seperti Bandung Bondowoso untuk memenuhi permintaan Roro Jonggrang mewujudkan Candi Sewu dalam waktu semalam. Maka seraya mengucapkan "la khaula wala quwwata illa billah" Fraksi Karya Sejahtera berharap, pembahasan Raperda APBD TA 2017 ini lancar sesuai yang diharapkan menjadi Perda APBD Kabupaten Rembang TA 2017.


Akhirnya, bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Rahayu ingkan sami pinanggih, wassalamu 'alaikum wr. wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,  H. ISMARI, SH



Sekretaris,  H. JOKO SUPRIHADI, SH

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMANDANGAN UMUM
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Dibacakan Oleh : Paramita Prapanca Aswari Nurul Rahajeng, S.Pd.

Yang Terhormat,
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.
Camat se Kabupaten Rembang
Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD T.A 2017 dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Memperhatikan Rancangan Peraturan Daerah APBD T.A 2017, maka kami dari fraksi Harapan perlu kiranya menyampaikan beberapa hal :

1. Untuk lebih mengoptimalkan peran Desa sesuai dengan Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kami harapkan :
 - a. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pendampingan dari sisi teknis, administrasi atau hukum. Pendampingan ini kita perlukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan ataupun paska kegiatan, sehingga proses pembangunan di tingkat Desa dapat berjalan dengan baik. Alokasi dana ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah agar program yang akan dilaksanakan oleh Desa tidak tumpang tindih dengan program dari Pusat, Provinsi atau Daerah. Sekaligus untuk menjaga agar program ini berjalan efektif dan efisien.
 - b. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk program peningkatan kompetensi aparatur Desa, mengingat Desa adalah garda terdepan pembangunan daerah.
2. Kami mengharapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan Honor untuk Pegawai Harian Lepas agar dapat disesuaikan dengan upah minimum di Kabupaten Rembang.
3. Kami mendukung program reformasi birokrasi Bupati dan Wakil Bupati, untuk itu perlu dicanangkan pola rekrutmen atau penilaian yang terbuka dan profesional dalam penempatan pada masing-masing perangkat daerah.
4. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016, kami mensinyalir terdapat beberapa kegiatan yang tidak akan selesai sampai akhir tahun anggaran 2016. Untuk itu, pemerintah daerah agar dapat segera menginventarisir jumlah kegiatan yang terancam putus kontrak dan segera menyiapkan skenario penganggarnya kembali untuk tahun 2017.

mpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Supaya lebih optimal, dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar dapat dipersiapkan lebih awal. Demikianlah pandangan umum dari Fraksi Harapan, semoga pembahasan Raperda APBD T.A 2017 ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT Amin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 22 November 2016

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Wakil Ketua

SUKARMAIN

Sekretaris

SAHNINGSIH, SE



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (II)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

Hari : RABU
Tanggal : 23 November 2016
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang ,

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2017;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
 2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 33 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 12 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.**

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang saya hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang.
- Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang.
- Yang saya hormati Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan
Camat se Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan
semua undangan lainnya yang tidak dapat saya
sebut satu persatu.

Sebelum melangkah pada acara pokok, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan anugerah yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti Rapat Paripurna Kedua DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Peserta rapat dan hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45

orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang.

Adapun keabsahan kuorum dalam rapat paripurna kedua ini adalah sama dengan ketentuan yang berlaku pada rapat paripurna pertama tanggal 22 November 2016 kemarin yakni Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Hal tersebut tertuang pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Dengan demikian Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat dimulai.

Untuk itu dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 11.45 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang tanggal 21 November 2016, yang menjadi agenda pokok dalam Rapat Paripurna Kedua membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 ini adalah Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Dan untuk selengkapnya, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan.
2. Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
3. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua dan merupakan acara pokok dalam rapat paripurna ini, yaitu Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Untuk itu waktu sepenuhnya kami berikan kepada Saudara Bupati untuk menyampaikan Jawabannya.

Dipersilahkan.

**===== JAWABAN BUPATI ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA APBD
KABUPATEN REMBANG T.A 2017 =====**

➤ (*Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 terlampir*)

Terima kasih Saudara Bupati atas jawabannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Demikian telah kita ikuti dan dengar bersama Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017. Dengan telah disampaikannya Jawaban Bupati, maka selesai sudah acara Rapat

Paripurna ini. Selanjutnya setelah rapat paripurna ini, pada hari ini juga akan dilaksanakan dua agenda rapat yakni : Rapat Badan Anggaran dan TAPD dengan acara penjelasan lanjutan atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, dilanjutkan dengan Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi dengan acara membahas strategi dan distribusi pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017. Untuk Rapat Paripurna Ketiga akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 November 2016.

Akhirnya terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat paripurna ini.

Dengan mengucapkan "*Alhamdulillahirobbil 'alamin*" tepat pukul 12.45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

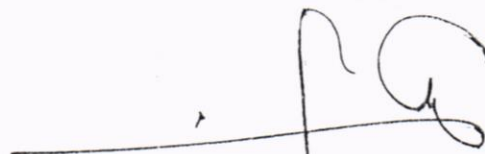
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,



H. GUNASIH, S.E.

SEKRETARIS



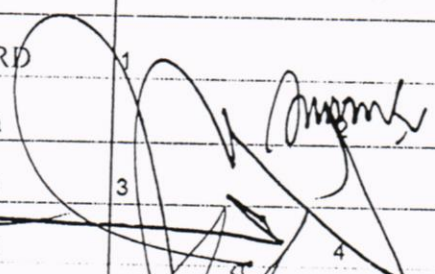
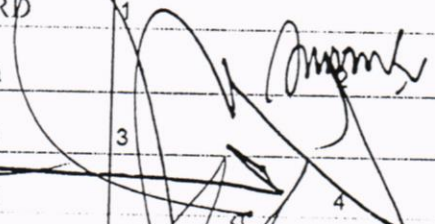



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum
Fraksi- Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun
Anggaran 2017;

DAFTAR HADIR
 RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA
 PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD KAB. REMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2017
 HARI/TANGGAL : RABU, 23 NOVEMBER 2016
 PUKUL : 11.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, S.E	Anggota		
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, B.A	Anggota		
23	WASIMAN	Anggota		
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33	i
34	II. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, S.P, M.H	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	i
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41	
FRAKSI HARAPAN				
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :


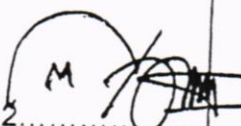

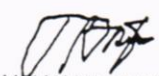


- 1 I : Ijin
- 2 B : Baki
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD T.A 2017

HARI : RABU , 23 NOVEMBER 2016

PUKUL : 11.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	Bambang S	Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5	HARIYANTO	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	SUKARDI	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Ir. HARI SUSANTO,M.Si	Pj Sekretaris Daerah	8. 



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011


**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD T.A 2017**

HARI : RABU, 23 NOVEMBER 2016

PUKUL : 11.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	Riyofit h.	1
2	CAMAT KALIORI	Bambang S	2
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SULANG	4
5	CAMAT BULU	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. W. G. T.	6
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	8
9	CAMAT LASEM	Master	9
10	CAMAT PANCUR	M. W.	10
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	Suby	12
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	14

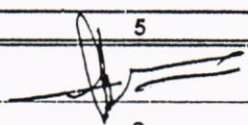




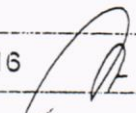

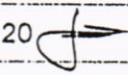

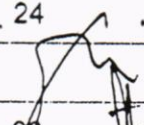
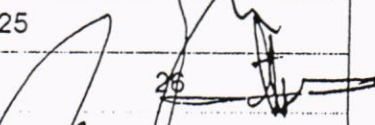
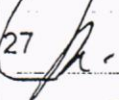



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



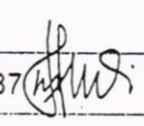
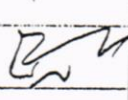
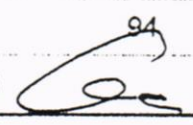
 Drs. **AHMAD MUALIF**
 NIP. 19620804 198803 1 011

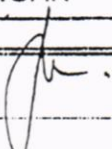

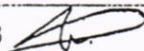

**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD T.A 2017**

HARI : RABU , 23 NOVEMBER 2016
PUKUL : 11.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	<i>Nora Effendi</i>	<i>STAB</i>	1 
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	<i>Yusuf Rus</i>	<i>Ka Humas</i>	10 
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	<i>Edy Hartono</i>		11 
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Supriyanto</i>		13 
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	<i>Iri Isti H</i>	<i>Subbag</i>	15 
16	BAG. UMUM	<i>Wijaya</i>	<i>Subbag</i>	16 
17	DIPPKAD	<i>MKS Tamin</i>	<i>Subbag</i>	17 
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	<i>NGATI KRI</i>	<i>Subbag</i>	20 
21	B K D			21
22	BKP & P4K			22
23	B P B D	<i>SUMARNO</i>	<i>Kabid</i>	23 
24	DINAS PEKERJAAN UMUM			24
25	DINAS KESEHATAN	<i>Supriyo Utomo</i>	<i>Celent</i>	25 
26	DINAS PENDIDIKAN	<i>Nora Effendi</i>	<i>Plt Kadis</i>	26 
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	<i>Saryono</i>	<i>Kabid</i>	27 
28	DINTANHUT	<i>Agus W H</i>	<i>Kabid</i>	28 
29	DINLUTKAN	<i>Sigitriana</i>	<i>Ka Dinas</i>	29 
30	DISHUBKOMINFO	<i>Sofyan</i>	<i>Kabid</i>	30 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	MUGROHO	Sekolah	31
32	DINSOSNAKERTRANS	H. WALLUPO	KADIS	32
33	DINBUDPARPORA	SURYANTAN	sek	33
34	DINAS ENERGI & SDM			34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Purwodis	ka.	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS			36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Esi Winarno	ka pustak.	37
38	KANTOR KPPT			38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	frederic		39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM	Masudi	Reporter	87 
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT	A. MUSKICH		92 
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95		Agus W	TAR-KS	95 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	Zaenal Arifan.	Zaenal Arifan.		96 
97	POLRES. PBT	INMA		97 
98		Hur		98 
99		Puzki		99 
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124
125				125



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

19620804 198803 1 011



JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN 2017



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat :

- Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;
- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Saudara Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali jawaban Saya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	I. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
1.	Pemerintah Daerah diharapkan selalu berkoordinasi dan bersinergi bersama Forkompinda dengan pihak APH untuk menjaga stabilitas pembangunan di daerah.	Pemerintah Daerah telah melakukan langkah-langkah nyata dalam menjaga stabilitas pembangunan di daerah melalui rapat-rapat komunikasi antara Forkompinda dengan Kepala SKPD maupun dengan pihak APH dengan SKPD terkait melalui fasilitasi permasalahan dengan membentuk TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah)
2.	Pemerintah Daerah segera melaksanakan program kegiatan TA 2017 lebih awal, secara cepat, terbuka dan transparan agar harapan masyarakat dapat terpenuhi.	Terima kasih, akan kami perhatikan dan tindaklanjuti.
3.	Pemerintah Kabupaten Rembang agar melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan rutin kepada pemerintahan desa agar pelaksanaan program pembangunan desa dan administrasi sesuai dengan harapan pemerintah.	Pemerintah Daerah telah melakukan langkah-langkah agar program pembangunan desa dapat berjalan sesuai ketentuan yaitu melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa fasilitasi Kecamatan kepada Desa serta dengan mengoptimalkan peran dan fungsi pendamping Desa yang direkrut Pemerintah.
4.	Pemkab. bersama dengan Forkompinda diharapkan tetap meningkatkan komunikasi/koordinasi yang lebih intensif terhadap jajarannya agar pelaksanaan Pilkades tetap kondusif, aman, lancar dan damai.	Terima kasih Kami telah melakukan komunikasi dan koordinasi bersama Forkompinda dengan Kepala SKPD terkait sampai ditingkat Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pilkades agar tetap kondusif, aman, lancar dan damai melalui Panitia tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sesuai tahapan.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	II.FRAKSI DEMOKRAT	
1	Pembangunan dan anggaran tahun 2017 dapat terserap dengan baik	Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen agar keseluruhan anggaran yang telah tersedia di Tahun Anggaran 2017 akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga proses pembangunan di Kabupaten Rembang dapat terwujud.
2	Pelaksanaan APBD T.A 2016 terkesan mbendol mburi	Berkenaan dengan kegiatan yang tercantum pada Perda Perubahan APBD 2016 pelaksanaannya tetap dilaksanakan di Triwulan IV dikarenakan Perda dimaksud ditetapkan pada Bulan Oktober 2016.
3	Konsultan Perencana dan SKPD dalam melaksanakan kegiatan tidak berkoordinasi dengan desa, pembangunan breakwater di Kec. Kragan hanya terbangun sepanjang 25 meter	Penyediaan anggaran konsultan perencanaan pada SKPD peruntukkannya sebagai penyedia jasa konsultasi perencanaan atas pekerjaan fisik yang dilaksanakan SKPD. Terkait dengan pembangunan breakwater di wilayah kecamatan kragan yang hanya terbangun 25 meter dikarenakan alokasi anggaran tersebut memang hanya cukup untuk membangun sepanjang 25 meter
4	Kebijakan terkait dengan kekurangan guru SD	Kekurangan guru SD di beberapa wilayah di Kabupaten Rembang lebih disebabkan distribusi guru yang kurang merata mengingat rasio guru dan murid di Kabupaten Rembang sebesar 1:15, sementara sesuai ketentuan rasio sebesar 1:30 sehingga secara total ketersediaan guru masih cukup. Kedepan akan kami upayakan pemerataan guru di sekolah-sekolah sehingga permasalahan kekurangan di beberapa tempat bisa teratasi.
5	RBSJ segera menyetorkan devidennya	Tahun buku 2014 dan 2015 PT. RBSJ memperoleh laba berjalan, namun mengingat s.d saat ini masih mempunyai akumulasi kerugian maka PT. RBSJ belum bisa memberikan deviden kepada pemilik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berkaitan dengan usulan penutupan RBSJ/mempihakketigakan/penjualan asset diperlukan kajian lebih mendalam/detail sepanjang tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
6	Bupati agar memanggil pihak bulog terkait beras raskin yang tidak layak konsumsi	<p>Raskin merupakan jenis beras medium dengan kadar air maksimal 14%, broken 20% dan mener 2%.</p> <p>Mekanisme pengadaan beras Perum Bulog dilakukan oleh Mitra kerja pengadaan dan kelompok tani lewat program SERGAB. Sesuai Inpres perberasan HPP beras medium sebesar Rp. 7.300,- per/kilo gram, sedangkan harga beras sejenis dipasaran sudah mencapai Rp. 8.000,- per/kilo gram</p> <p>Pada tahun 2016 pengadaan beras di Gudang Bulog Rembang sejumlah 17.790.000 kg dan gabah setara beras 1.676.400 kg dan disalurkan untuk Raskin alokasi bulan Januari s.d Desember 2016 sejumlah 12.422.520 kg sehingga masih terdapat stok untuk alokasi Raskin pada tahun 2017 sejumlah 7.043.880 kg (untuk alokasi 7 bln)</p> <p>Berdasarkan stok beras di Gudang Bulog selama 19 bulan tentunya akan mengalami penurunan kualitas, baik peningkatan kadar air maupun peningkatan butir patah (broken) sedangkan pada sisi lain Bulog dituntut untuk penyerapan beras pada masa panen sebesar-besarnya dan dihadapkan pada HPP yang tidak sesuai dengan harga beras dipasaran.</p> <p>Apabila dijumpai Raskin yang tidak layak konsumsi Bulog telah berkomitmen akan segera mengganti dengan beras yang sesuai ketentuan maksimal 2 x 24 jam.</p>

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN								
III. FRAKSI P K B										
1.	Terjadi penurunan anggaran hampir di semua SKPD, sebab disatu sisi dinas dituntut sigap untuk bekerja, tapi disisi lain TAPD tidak memberikan anggaran yang cukup, bagaimanakah hal ini bisa terjadi?	Penurunan anggaran dihampir semua SKPD terkait dengan upaya efisiensi anggaran dan upaya peningkatan belanja publik/belanja modal, sehingga sesuai arah kebijakan pembangunan tahun 2017 lebih memprioritaskan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah, disisi lain mengurangi belanja yang sifatnya rutin misal perjalanan dinas, kegiatan rapat, alat tulis, study banding dll. Hal ini juga searah dengan pandangan umum fraksi yang sering disampaikan agar Pemerintah Daerah meningkatkan belanja kegiatan publik/belanja modal.								
2.	Keberadaan RBSJ yang tidak sesuai dengan tujuan awal didirikannya dimana sampai hari ini belum bisa memberikan deviden sama sekali bahkan ketika cek lapangan pada dinas terkait, RBSJ mengalami kerugian.	Terima kasih, lihat jawaban kami pada Fraksi Demokrat.								
3.	Prioritas pembangunan hendaknya lebih fokus pada bidang infrastruktur jalan poros antar desa dan antar kecamatan sehingga penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.	Pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan infrastruktur Jalan dan jembatan ± Rp. 72.680.000.000,- sehingga keseluruhan jalan kecamatan se Kabupaten Rembang dapat dilaksanakan pembangunannya.								
4.	Pemerintah Kabupaten perlu melakukan evaluasi Perda tentang nelayan yang memberatkan masyarakat.	Perda tentang Pengelolaan TPI tidak memberatkan justru mengalami penurunan. Perda Nomor 4 Tahun 2009 nelayan dikenakan retribusi 1,9 % sedangkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 retribusi nelayan turun menjadi 1,45 %								
5.	Adanya alokasi anggaran untuk Tenaga Harian Lepas, organisasi kemasyarakatan, kesejahteraan tenaga guru madin dan lembaga pendidikan Islam.	Pemenuhan honor terhadap Tenaga Harian Lepas organisasi kemasyarakatan, kesejahteraan tenaga guru madin dan lembaga pendidikan Islam telah terakomodir pada RAPBD 2017								
6.	Terkait belanja daerah apakah belanja langsung sebesar Rp.632.973.765.647,00 yang proporsinya terdiri belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal apakah sudah proporsional sebab porsi belanja pegawai masih terlalu tinggi tidak sebanding dengan belanja modal yang diberikan.	Kami jelaskan bahwa secara rinci jumlah belanja langsung sebesar Rp.632.973.765.647,00 adalah : <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Blj. Pegawai</td> <td style="text-align: right;">159.870.956.976</td> </tr> <tr> <td>Blj. Barang/Jasa</td> <td style="text-align: right;">200.469.614.229</td> </tr> <tr> <td>Blj. Modal</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">272.633.194.442</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">Jumlah</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">632.973.765.647</td> </tr> </table> <p>Berdasarkan rincian tersebut diatas, jelas belanja modal lebih besar bila dibandingkan Belanja Pegawai maupun Belanja Barang/Jasa.</p>	Blj. Pegawai	159.870.956.976	Blj. Barang/Jasa	200.469.614.229	Blj. Modal	272.633.194.442	Jumlah	632.973.765.647
Blj. Pegawai	159.870.956.976									
Blj. Barang/Jasa	200.469.614.229									
Blj. Modal	272.633.194.442									
Jumlah	632.973.765.647									

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		Dan perlu diketahui bahwa total Belanja Langsung diatas belum termasuk DAK dan Bantuan Keuangan Propinsi apabila dua sumberdana tersebut sudah masuk, tentu akan meningkatkan proporsi Belanja Modal.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<p><u>IV. FRAKSI PDIP DAN NASDEM</u></p>	
1.	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan DPU agar sesuai rencana anggaran	Terima Kasih, akan kami perhatikan.
2.	Hibah Bansos agar mencakup semua elemen masyarakat	Akan kami tindaklanjuti dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada.
3.	Berkurangnya anggaran pada SKPD	Lihat Jawaban Fraksi PKB Nomor 1
4.	Pemutakhiran data penerima BPJS pusat maupun KIP	<p>Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi pemegang KIS (PBI) dari pusat yang dilaksanakan BPJS kesehatan, Dinas Kesehatan berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta KIS. Adapun data yang dipakai sebagai dasar kepesertaan berasal dari BPS (basis data terpadu tahun 2015). Sedang untuk validasi data kepesertaan menjadi kewenangan Dinas Sosial. Sedangkan untuk KIP jika terjadi kesalahan data dan tidak sesuai dengan kenyataan, Kemendikbud sudah memberikan solusi untuk pengusulan penerima dana KIP, dengan syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Kartu Keluarga sejahtera (KKS) 2. Sebagai peserta Prpgram Keluarga Harapan (PKH) 3. Menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa kepada sekolah
5.	Honor Tenaga Harian Lepas (THL) agar sesuai UMK	Sudah kami alokasikan untuk honor THL sesuai UMK meskipun belum menyeluruh.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
<u>V. FRAKSI GERINDRA</u>		
1	PAD Tahun Anggaran 2017 sebesar 215 M, lebih rendah dibanding Tahun Anggaran 2016 sebesar 217 M	Rencana PAD tahun anggaran 2017 telah kami perhitungkan sesuai potensi pajak daerah yang berpedoman pada Permendagri 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. Dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2016 kami sudah mengalami kenaikan sebesar 35 M.
2	Piutang Pajak 29 M belum masuk dalam potensi pendapatan	Piutang Pajak sebesar 29 M adalah piutang PBB-P2 hasil peralihan dari KPP Pratama Pati kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang masih perlu dilakukan verifikasi, sehingga piutang tersebut belum kami masukan dalam potensi pendapatan. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan KPP Pratama Pati untuk mencari solusi penyelesaian terhadap piutang yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang. 2. Bersama dengan Kepala Desa melakukan verifikasi terhadap piutang yang ada di masing-masing desa.
3	Prediksi SiLPA 183 M masih terlalu rendah	Prediksi SiLPA sudah kami hitung dan kami sesuaikan dengan prediksi kinerja pelaksana kegiatan tahun 2016.
4	- Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung pada RAPBD TA. 2016 sebesar 705 M sedang TA. 2017 naik menjadi 735 M	Rencana Belanja Pegawai tahun 2017 lebih besar dibanding tahun 2016, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan Tunjangan sertifikasi Guru dari 154 M menjadi 213 M, sedangkan untuk belanja gaji dan tunjangan justru mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 30 M, dengan rincian sebagai berikut :

No	PERTANYAAN	JAWABAN			
		Dalam ribuan rupiah			
			Uraian	APBDP 2016	Raperda 2017
		1	Gaji & Tunj. PNS	504.876.454	474.658.809
		2	DPRD	10.217.563	10.277.495
		3	BPO DPRD	393.120	393.120
		4	Insentif pemungutan Pajak Daerah	2.686.500	2.232.500
		5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.387.000	1.287.000
		6	BPO KDH/WakaDH	600.000	600.000
		7	TPP PNS	29.668.800	30.845.400
		8	TPP Guru PNS	1.384.762	2.324.700
		9	Sertifikasi Guru	154.358.922	213.028.841
				705.573.121	735.747.865
	- Jumlah Pegawai yang pensiun sejak tahun 2010 sampai sekarang	Pegawai yang pensiun sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sejumlah 1.564 orang, dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2010 sejumlah 254 2. Tahun 2011 sejumlah 200 3. Tahun 2012 sejumlah 304 4. Tahun 2013 sejumlah 281 5. Tahun 2014 sejumlah 137 6. Tahun 2015 sejumlah 156 7. Tahun 2016 sejumlah 232			
5	Perubahan etos kerja pegawai di tahun 2017 agar menjadi lebih baik	Terima Kasih, akan kami perhatikan			
6	PILKADES rawan money politic	Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pilkades, Pemerintah Kabupaten Rembang telah membentuk Tim pengamanan PILKADES Tahun 2016 yang anggotanya terdiri dari TNI, POLRI dan LINMAS mulai Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kabupaten.			

No	PERTANYAAN	JAWABAN
VI. FRAKSI KARYA SEJAHTERA		
1.	Asumsi target pendapatan masih sangat normatif, belum menunjukkan terobosan inovatif dalam peningkatan PAD	Upaya - upaya telah dilakukan dalam rangka pemenuhan target PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah dengan perhitungan yang rasional.
2.	Belum ada rumusan tentang kebijakan untuk meningkatkan serapan anggaran setiap SKPD sehingga kegiatan - kegiatan dikhawatirkan tidak berjalan secara efektif	Telah dibentuk Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang melaksanakan langkah-langkah nyata percepatan penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang agar seluruh SKPD dapat melaksanakan Program - Kegiatan sesuai dengan anggaran dan waktu yang tersedia pada masing - masing DPA-SKPD. Disamping itu kinerja TP4D dan Rakor senenan akan terus ditingkatkan.
3.	Kebijakan Bantuan Keuangan Desa belum cukup fokus dan terarah, apa indikator dan prioritas pembangunan desa di Kab. Rembang	Terima kasih masukannya, kedepan bantuan keuangan desa akan difokuskan dan diarahkan sesuai dengan kebutuhan desa yang sangat mendesak dan merupakan prioritas desa, secara umum Indikator Pembangunan Desa di Kabupaten Rembang adalah Ketersediaan dan Kemudahan Sarana - Prasarana di lingkungannya, adapun prioritas dalam pembangunan desa antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan standar pelayanan minimum di Desa ; 2. Pembangunan SDM, Pemberdayaan dan Modal sosial budaya masyarakat desa ; 3. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa ; 4. Penguatan Pemerintahan Desa ; 5. Pengembangan ekonomi kawasan ; 6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan.
4.	SiLPA sebesar Rp. 183.136.730.002,- hal ini mengindikasikan bahwa komitmen SKPD dalam melaksanakan pembangunan kurang optimal	Perhitungan SiLPA pada RAPBD TA. 2017 telah merencanakan indikator yang termasuk komponen SiLPA seperti pelampauan pendapatan, efisiensi belanja dll, angka SiLPA T.A 2016 yang sesungguhnya akan diketahui setelah diaudit oleh BPK - RI
5.	Rumusan kebijakan belanja langsung belum berkaitan erat dengan prioritas pembangunan Tahun 2017	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang telah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar di tinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja sebagaimana tercantum dalam RKA pada masing-masing SKPD.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
6.	Komitmen SKPD dalam melaksanakan pembangunan kurang optimal	Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang telah berusaha keras untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan yang telah tercantum dalam DPA-SKPD.
7.	Dalam RAPBD 2017 telah tertera Dana Transfer Khusus sebesar Rp. 195.353.541.000,-	Komponen Dana Perimbangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2017 adalah Dana Transfer Umum yang terdiri dari DAU dan DBH sedangkan Dana Transfer Khusus, terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dalam RAPBD T.A 2017 DAK Non Fisik telah tercantum sebesar Rp. 195.353.541.000,- yang peruntukannya membayar Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD dan TPP Guru PNSD.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	VII. FRAKSI HARAPAN	
1.	Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk pendampingan dari sisi teknis, administrasi dan hukum untuk menjaga agar program ini berjalan efektif dan efisien dan juga pengalokasian anggaran untuk program peningkatan kompetensi aparatur desa.	Pemda telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Desa yang telah dialokasikan pada: a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. b. Kantor Kecamatan se Kab. Rembang. Disamping itu telah tersedia tenaga pendamping yang direkrut melalui anggaran APBN.
2.	Pemerintah Daerah agar meningkatkan honor pegawai harian lepas agar dapat disesuaikan dengan upah minimum di Kab. Rembang.	Terima kasih telah kami tindak lanjuti dalam RAPBD TA 2017.
3.	Perlunya dicanangkan pola rekrutmen atau penilaian yang terbuka dan professional dalam penempatan jabatan pada masing-masing perangkat daerah.	Telah kita alokasikan anggaran pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah untuk kegiatan uji kompetensi bagi pejabat eselon II dan III sebagai dasar penempatan Pejabat pada jabatan yang tepat.
4.	Terkait pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 yang tidak akan selesai pada akhir tahun agar pemerintah daerah segera menginventarisir jumlah kegiatan yang terancam putus kontrak dan segera menyiapkan skenario penganggarnya kembali pada Tahun 2017.	Terima kasih, akan kita inventarisir kegiatan yang tidak selesai pada akhir tahun 2016.


Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan komisi-komisi.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 23 Nopember 2016

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Hari : SELASA
Tanggal : 29 November 2016
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. SIFAT RAPAT : Terbuka

III. ACARA RAPAT:

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
3. Pendapat Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
4. Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2017;
5. Persetujuan atas Raperda, dilanjutkan penandatanganan persetujuan dan penyerahan Keputusan DPRD;
6. Pendapat Akhir Bupati atas pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL. MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 10 orang
 2. Fraksi Demokrat : 8 orang
 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa : 6 orang
 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 8 orang
 5. Fraksi Gerindra : 5 orang
 6. Fraksi Karya Sejahtera : 4 orang
 7. Fraksi Harapan : 4 orang
- Jumlah

 : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 10 orang
 2. Fraksi Demokrat : 6 orang
 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa : 4 orang
 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 8 orang
 5. Fraksi Gerindra : 2 orang
 6. Fraksi Karya Sejahtera : 3 orang
 7. Fraksi Harapan : 3 orang
- Jumlah

 : 36 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : - orang
2. Fraksi Demokrat : 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa : 2 orang

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: - orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang saya hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badan, Dinas, Instansi, Bagian dan Camat
se Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan semua
undangan lain yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 29 November 2016 kita masih berkesempatan

mengikuti Rapat Paripurna Ketiga DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Rapat Paripurna ini merupakan Rapat Paripurna terakhir dalam membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, yang mana di dalam pembahasannya dilalui dengan berbagai tahapan, baik yang sifatnya internal yaitu dibahas oleh DPRD sendiri, maupun yang sifatnya eksternal yaitu dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Rembang.

Semua ini ini dilakukan tidak lain adalah untuk menetapkan dan memutuskan arah Kebijakan Daerah Kabupaten Rembang dalam menentukan posisi Anggaran Daerah sehingga dapat mencakup kepentingan Aparatur maupun Kepentingan Publik demi terwujudnya Kabupaten Rembang ke depan yang lebih baik.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 36 orang.

Adapun ketentuan kuorum yang berlaku dalam rapat paripurna ketiga ini adalah sama dengan ketentuan yang berlaku pada rapat paripurna pertama tanggal 22 November 2016 maupun rapat paripurna kedua tanggal 23 November 2016 dalam membahas Raperda tentang

APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 yaitu dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Dengan demikian kuorum rapat telah terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita mulai.

Selanjutnya dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 11.55 WIB. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
3. Pendapat Fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
4. Persetujuan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017;
5. Persetujuan atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 dilanjutkan penandatanganan persetujuan dan penyerahan Keputusan DPRD ;

6. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
7. Penutup.

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Kepada Saudara Drs. Achmad Mualif dipersilahkan.

===== LAPORAN BADAN ANGGARAN =====

➤ ***(Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 terlampir)***

Terima kasih Saudara Drs. Achmad Mualif atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Memasuki acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Untuk kelancarannya, saya mohon kepada Saudara-saudara yang ditunjuk untuk menyampaikan Pendapat Fraksi, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Henry Purwoko, S.Pd.
2. Fraksi Demokrat : Sdr. Edi Kartono, S.Pd.M.H.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Muh. Asnawi, S.Pdi.

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdri. Frida Iriani
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : Sdr. Puji Santoso, S.P.M.H.
6. Fraksi Karya Sejahtera : H. Joko Suprihadi, S.H.
7. Fraksi Harapan : Sdri. Sahningsih, S.E.

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dipersilahkan.

Nama Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Demokrat	✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓		
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	✓		
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	✓		
Fraksi Karya Sejahtera	✓		
Fraksi Harapan	✓		

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaianannya.

➤ (*Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 terlampir*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara keempat, yaitu Persetujuan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017.

Amanat Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan :

- ayat (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan perda.
- ayat (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- ayat (3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- ayat (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Merujuk ketentuan tersebut, melalui surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 188.3/2286/2016 tanggal 31 Oktober 2016 telah disampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 kepada DPRD, yang selanjutnya oleh DPRD Kabupaten Rembang melalui Badan Pembentukan Perda telah dilakukan koordinasi untuk menyusun Program Pembentukan Perda bersama Tim Penyusun Pembentukan Perda Pemerintah Kabupaten Rembang.

Adapun hasilnya berupa Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Program Pembentukan Perda Kabupaten Rembang Tahun 2017 sebagaimana fotocopy yang berada di tangan Saudara-saudara. Sehubungan untuk keabsahannya perlu persetujuan dari anggota DPRD, maka saya tawarkan kepada Saudara-saudara yang hadir dalam rapat paripurna ini :

- Interusi Sdr. H. Joko Suprihadi (Fraksi Karya Sejahtera)
 “ Maaf Pimpinan terkait usulan rancangan Program Peraturan Pembentukan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 untuk yang nomor 12 menurut catatan kami kata “ hukum “ nya tidak ada Pimpinan hanya “ Perlindungan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang saja.”
- H. Majid kamil MZ (Pimpinan Rapat)
 “ Oke nanti saya konfirmasi dengan Pak Muallif yang benar yang mana “
- Sdr. Henry Purwoko, S.Pd. (Fraksi PPP)
 “ Maaf Pimpinan saya kira Bapemperda itu kan sudah berkomunikasi dengan eksekutif mungkin saja rancangan ini salah ketik”
- H. Majid kamil MZ (Pimpinan Rapat)
 “ Oke mungkin saja salah ketik, tapi kita setuju dulu saja nanti kita konfirmasi mana judul yang benar. Bagaimana setujuuuuu????”
- “ Semua anggota DPRD yang hadir menjawab setuju”

“Apakah Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 dapat disetujui dan disahkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 ?”

===== SETUJUUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuk acara berikutnya acara kelima yaitu Persetujuan Penetapan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Sehubungan moment ini sangat menentukan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Rembang satu tahun ke depan, kami berharap kepada seluruh anggota DPRD untuk lebih fokus dalam memberikan tanggapan, oleh karena semuanya dimulai dari pengambilan keputusan rekan-rekan anggota dalam memberikan persetujuan.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD melalui laporannya dapat disetujui ?”

=====SETUJUUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dengan telah diperolehnya persetujuan dari anggota terhadap raperda, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang atas Raperda, diteruskan dengan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda. Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik, saya mohon kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk berkenan memandu jalannya prosesi.

Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD.

Dipersilahkan.

**===== PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA DAN
PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD=====**

Terima kasih Saudara Sekretaris DPRD yang telah memandu jalannya prosesi penandatanganan dan penyerahan keputusan DPRD.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 yang telah disetujui, akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi, agar tercapai keselarasan antara kebijakan daerah, provinsi dan nasional maupun sinergitas antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk menghindari agar Peraturan Daerah tentang APBD nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara terakhir yaitu Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Kepada saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

=====PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI =====

➤ ***(Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 terlampir)***

Terima kasih saudara Bupati, atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini. Terima kasih kepada Saudara Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota DPRD yang masuk dalam Komisi maupun Badan Anggaran, Sekretaris DPRD beserta staf yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sehingga pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 dapat berjalan lancar sesuai waktu yang telah dijadwalkan.

Akhirnya dengan mengucapkan “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 13.15 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

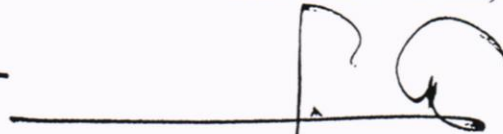
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF

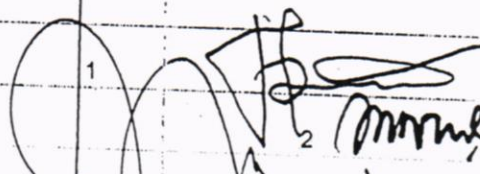
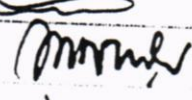




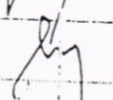

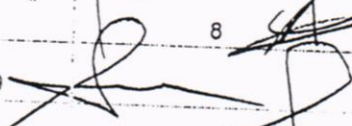
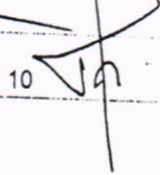
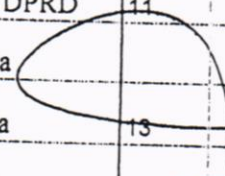
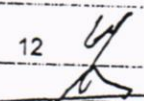
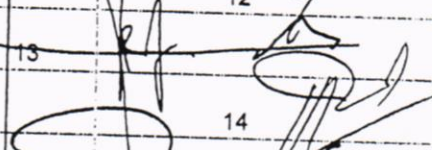

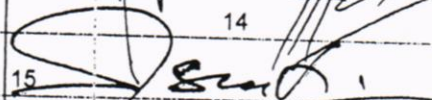

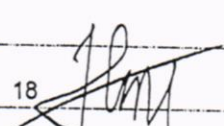

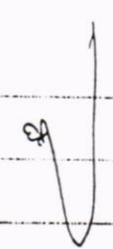
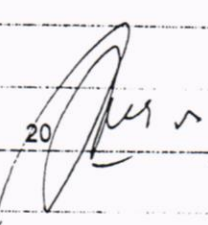
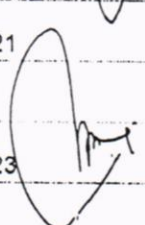

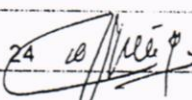
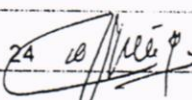
Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD. dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan
Raperda APBD Tahun Anggaran 2017;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun
Anggaran 2017;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Nomor.....²²... Tahun 2016
Tentang Persetujuan Rancangan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2017;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2016
Tentang Persetujuan Penetapan Raperda APBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
- LAMPIRAN VI : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan
Raperda APBD Tahun Anggaran 2017;
- LAMPIRAN VI : Berita Acara Nomor : 900/ 2588 / 2016, 900/ 645
/2016 tentang Persetujuan Bersama Kepala
Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang tentang
Raperda APBD Tahun Anggaran 2017.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD KAB. REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017
HARI/TANGGAL : SELASA , 29 NOVEMBER 2016
PUKUL : 11.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, S.E	Anggota		
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, B.A	Anggota		
23	WASIMAN	Anggota		
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, S.P, M.H	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41	
FRAKSI HARAPAN				
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	


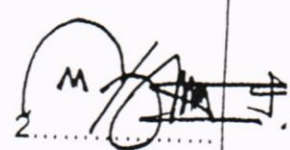
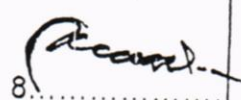
eterangan :

- 1. i : Ijin
- 2. S : Sakit
- 3. C : Cuti
- 4. DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD T.A 2017

HARI : RABU , 29 NOVEMBER 2016
PUKUL : 11.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.....
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.....
5	Dandim 0720 Rembang	5.....
6	Kepolisian Resort Rembang	6.....
7	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.....
8	Ir. HARI SUSANTO, M.Si	Pj Sekertaris Daerah	8. 


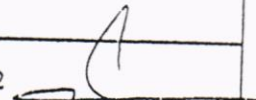


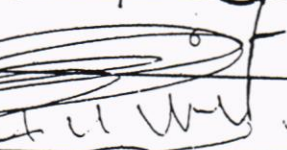
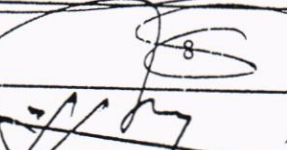
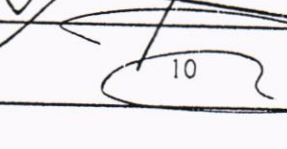
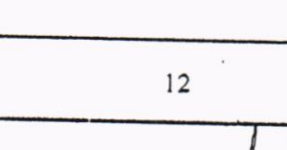
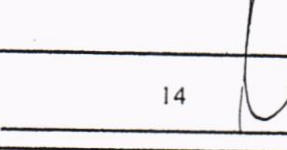

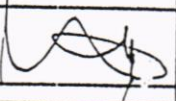


SEKRETARIAT DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD T.A 2017**

HARI : RABU , 29 NOVEMBER 2016
PUKUL : 11.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus Bala	1 
2	CAMAT KALIORI	MUSTHO LIAH	2 
3	CAMAT SUMBER	HERIYONO	3 
4	CAMAT SULANG	4 
5	CAMAT BULU	SUSWANTORO	5 
6	CAMAT PAMOTAN	M. W. Yono	6 
7	CAMAT GUNEM	TEGAR	7 
8	CAMAT SALE	Kunyah	8 
9	CAMAT LASEM	Kurni P	9 
10	CAMAT PANCUR	Noslihan Efes	10 
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	12
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	Eddy Triyanto	14 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



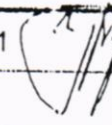

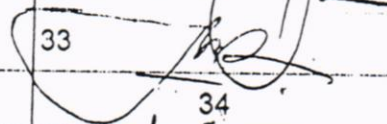


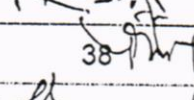
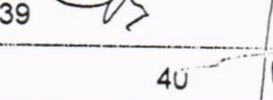
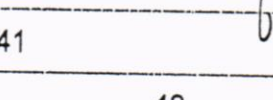

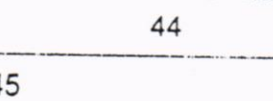
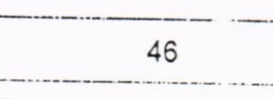
Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

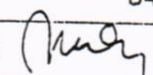
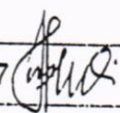


**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD T.A 2017**

HARI RABU, 20 NOVEMBER 2016

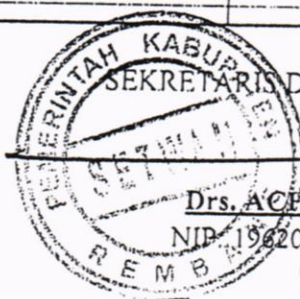
PUKUL : 11.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Hour effendi	Staf	1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI	Wartow	-	3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Alex sandi	Bag Tata	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Yohana SW	Bag Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Caentrot		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	SPATE Ponsellan		13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Mi Hojan		14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Sei Senarun	Bag. Orgn	15
16	BAG. UMUM	Swomyas	Bag. Umum	16
17	DPPKAD	Rudi S		17
18	INSPEKTORAT	FAHRUDIN		18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	DAN Wahyuni H.	ka	20
21	B K D	Bambang R	Kabard	21
22	BKP & P4K	Nur Hidayati	Kemb Keb	22
23	B P B D	SUHARBU	K. S. S.	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Imyoto Ika	sekt	24
25	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utomo	Dinkes	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Hour effendi	Plt Kadis	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Suryana	Indusop	27
28	DINTANHUT	Suryamin	Dintanhut	28
29	DINLUTKAN			29
30	DISHUBKOMINFO			30

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL			31 
32	DINSOSNAKERTRANS	H. WALLYO		32 
33	DINBUDPARPORA	SURYANING	sch	33 
34	DINAS ENERGI & SDM			34 
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Purwandi	ba	35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Egi W	ka kantor	36 
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Didik S	ka pu	37 
38	KANTOR KPPT	Sri Sugiyanti	ka PTT	38 
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Agus Joga	dipltr	39 
40	SATPOL PP	Stewart Resti	ka sat pol pp	40 
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41 
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA	Mulyanto.		85 
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM	Masudi	Reporter	87 
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT	H. MULICH M		92 
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95		Agus W	TA FICS	95 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124
125				125



 Drs. ACEMAD MUALIF

 NIP. 19620804 198803 1 011

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD
KABUPATEN REMBANG



TENTANG

PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD
KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2017



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017**

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Bahwa hasil pembahasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
10. Surat Bupati Rembang Nomor 188.3/2460/2016 tanggal 21 November 2016 perihal Pengiriman Raperda;
11. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 21 November 2016 yang mengagendakan Penjadwalan pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Paripurna I dalam rangka pembahasan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2016
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Paripurna
Acara : 1. Penjelasan Bupati Atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

- b. Rapat Paripurna II dalam rangka pembahasan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 23 November 2016
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Paripurna

- Acara : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.
- c. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada tanggal 23 November 2016 Jam 13.00 WIB dengan acara penjelasan lanjutan atas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.
- d. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi - komisi DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 23 November 2016 Jam 14.00 WIB membahas Strategi dan distribusi Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.
- e. Rapat-rapat Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Rembang dengan SKPD / Instansi terkait dilaksanakan pada :
- Hari : Kamis - Jum'at
Tanggal : 24 sampai dengan 25 November 2016
Jam : 09.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Komisi A,B,C dan D DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Pendalaman Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.
- f. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :
- Hari : Jum'at
Tanggal : 25 November 2016
Jam : 18.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Penyampaian Laporan Komisi - komisi kepada Banggar atas hasil pendalaman Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.
- g. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :
- Hari : Sabtu
Tanggal : 26 November 2016
Jam : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD
Kabupaten Rembang
Acara : Rapat lanjutan Penyampaian Laporan
Komisi - komisi kepada Banggar atas
hasil pendalaman Raperda tentang
APBD Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2017.
Dasar : Berita Acara Penundaan rapat Badan
Anggaran dengan Pimpinan Komisi-
Komisi DPRD kabupaten Rembang
Nomor : 170 /629/2016.

h. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-komisi
DPRD Kabupaten Rembang pada :

Hari : Senin
Tanggal : 28 November 2016
Jam : 09.30.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD
Kabupaten Rembang
Acara : Rapat Lanjutan Penyampaian Laporan
Komisi - komisi kepada Banggar atas
hasil pendalaman Raperda tentang
APBD Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2017.
Dasar : Berita Acara Penundaan rapat Badan
Anggaran dengan Pimpinan Komisi -
Komisi DPRD kabupaten Rembang
Nomor : 170 / 631 /2016.

i. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD pada :

Hari : Senin
Tanggal : 28 November 2016
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD
Kabupaten Rembang
Acara : Sinkronisasi dan harmonisasi hasil
pembahasan Raperda tentang APBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2017.

IV. HASIL RAPAT :

Badan Anggaran DPRD telah melakukan pembahasan Raperda Kabupaten Rembang tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dengan jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

HASIL PEMBAHASAN
RINGKASAN RAPBD INDUK 2017

NO	SKPD	RANCANGAN APBD INDUK 2017	PEMBAHASAN	
			PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4-3
1	PENDAPATAN DAERAH	1.554.122.538.366	1.554.462.883.866	340.345.500
1.1	Pendapatan Asli Daerah	215.400.264.155	215.635.074.655	234.810.500
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	45.678.500.000	46.178.500.000	500.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21.133.688.500	20.928.499.000	(205.189.500)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.215.000.000	8.215.000.000	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.373.075.655	140.313.075.655	(60.000.000)
1.2	Dana Perimbangan	1.076.782.032.211	1.076.887.567.211	105.535.000
1.2.2	Dana Transfer Umum	881.428.491.211	881.534.026.211	105.535.000
1.2.3	Dana Transfer Khusus	195.353.541.000	195.353.541.000	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	261.940.242.000	261.940.242.000	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.566.904.000	1.566.904.000	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	81.510.000.000	81.510.000.000	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	178.863.338.000	178.863.338.000	-
2.	BELANJA DAERAH	1.731.069.268.368	1.738.067.268.368	6.998.000.000
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.098.095.502.721	1.097.000.502.721	(1.095.000.000)
2.1.1	Belanja Pegawai	735.747.865.000	735.747.865.000	-
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	30.015.835.500	27.114.202.500	(2.901.633.000)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.525.000.000	11.375.000.000	(150.000.000)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Propinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	6.455.961.000	6.455.961.000	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	313.350.841.221	315.307.474.221	1.956.633.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	-
2.2	Belanja Langsung	632.973.765.647	641.066.765.647	8.093.000.000
2.2.1	Belanja Pegawai	159.870.956.976	161.410.764.976	1.539.808.000
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.469.614.229	199.988.966.229	(480.648.000)
2.2.3	Belanja Modal	272.633.194.442	279.667.034.442	7.033.840.000
	Jumlah Belanja surplus (devisit)	1.731.069.268.368	1.738.067.268.368	6.998.000.000
		(176.946.730.002)	(183.604.384.502)	(6.657.654.500)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	183.136.730.002	189.794.384.502	6.657.654.500
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	183.136.730.002	189.794.384.502	6.657.654.500
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	183.136.730.002	189.794.384.502	6.657.654.500
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.190.000.000	6.190.000.000	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	6.190.000.000	6.190.000.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.190.000.000	6.190.000.000	-
	Pembiayaan Netto	176.946.730.002	183.604.384.502	6.657.654.500
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	-	-

REKAPITULASI
ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD 2017

NO.	SKPD	R APBD 2017			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2		3	4	5=3+4
1	DINPENDIKPORA	-	500.076.088.000	80.280.996.700	580.357.084.700
2	DINAS KESEHATAN	42.919.634.184	45.933.454.000	58.418.547.184	104.352.001.184
3	RSUD dr R. SOETRASNO	88.000.000.000	25.088.890.000	102.205.367.000	127.294.257.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.255.000.000	15.161.300.000	88.224.500.000	103.385.800.000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	48.013.000.000	48.013.000.000
6	SATPOL PP	-	3.525.496.000	4.621.500.000	8.146.996.000
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	1.496.764.000	2.129.002.000	3.625.766.000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2.162.127.000	5.372.000.000	7.534.127.000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	5.034.433.000	8.362.752.000	13.397.185.000
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	1.490.586.000	2.879.500.000	4.370.086.000
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	121.472.000	13.017.335.000	28.103.500.000	41.120.835.000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	2.747.592.000	6.822.200.000	9.569.792.000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	2.996.636.000	1.486.866.000	4.483.502.000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	9.007.313.000	4.490.000.000	13.497.313.000
15	DINAS PERHUBUNGAN	1.703.864.000	5.714.844.000	16.338.000.000	22.052.844.000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	1.356.000.000	1.356.000.000
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.062.000.000	2.610.298.000	6.724.130.000	9.334.428.000
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	2.048.742.000	3.025.082.000	5.073.824.000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.296.285.265	4.221.585.000	21.961.377.642	26.182.962.642
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	3.300.000.000	9.540.813.000	18.275.769.000	27.816.582.000
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	10.277.495.000	-	10.277.495.000
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	767.037.000	-	767.037.000
23	SETDA	8.371.000.000	13.633.383.000	43.268.737.061	56.902.120.061
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	21.000.000	-	17.255.000.000	17.255.000.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	570.000.000	570.000.000
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	90.000.000	13.633.383.000	17.740.500.000	31.373.883.000
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	45.000.000	-	1.300.000.000	1.300.000.000
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	2.105.212.061	2.105.212.061
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	1.915.000.000	1.915.000.000
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	8.215.000.000	-	958.025.000	958.025.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	1.425.000.000	1.425.000.000
24	SEKRETARIAT DPRD	-	3.918.796.000	30.478.291.000	34.397.087.000
25	KECAMATAN REMBANG	-	5.297.447.000	4.295.326.000	9.592.773.000
26	KECAMATAN KALIORI	-	2.090.850.000	623.244.000	2.714.094.000
27	KECAMATAN SULANG	-	1.855.144.000	3.954.200.000	5.809.344.000
28	KECAMATAN SUMBER	-	1.725.568.000	698.139.000	2.423.707.000
29	KECAMATAN BULU	-	1.686.054.000	695.150.000	2.381.204.000
30	KECAMATAN LASEM	-	2.037.944.000	689.731.600	2.727.675.600
31	KECAMATAN PANCUR	-	2.077.469.000	684.400.000	2.761.869.000
32	KECAMATAN SLUKE	-	1.525.858.000	885.770.000	2.411.628.000
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	1.668.157.000	677.500.000	2.345.657.000
34	KECAMATAN GUNEM	-	1.677.129.000	548.887.000	2.226.016.000
35	KECAMATAN SALE	-	1.582.351.000	764.450.000	2.346.801.000
36	KECAMATAN KRAGAN	-	1.953.432.000	852.830.460	2.806.262.460
37	KECAMATAN SEDAN	-	1.757.607.000	762.593.000	2.520.200.000
38	KECAMATAN SARANG	-	2.164.526.000	522.960.000	2.687.486.000
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	3.360.065.000	5.440.000.000	8.800.065.000
40	BAPPEDA	-	3.473.933.000	5.604.500.000	9.078.433.000
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.394.093.282.917	377.923.458.721	16.287.467.000	394.210.925.721
a	(SKPD)	55.371.008.706	15.575.821.000	16.287.467.000	31.863.288.000
b	(PPKD)	1.338.722.274.211	362.347.637.721	-	362.347.637.721
42	BKD	-	3.767.503.000	6.149.500.000	9.917.003.000
	JUMLAH	1.554.122.538.366	1.098.095.502.721	632.973.765.647	1.731.069.268.368

REKAPITULASI
ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD 2017

NO.	SKPD	PEMBAHASAN PERSETUJUAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2		6	7	8=6+7
1	DINPENDIKPORA	-	500.076.088.000	80.410.996.700	580.487.084.700
2	DINAS KESEHATAN	42.919.634.184	45.933.454.000	58.418.547.184	104.352.001.184
3	RSUD dr R. SOETRASNO	88.000.000.000	25.088.890.000	102.205.367.000	127.294.257.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.255.000.000	15.161.300.000	93.999.500.000	109.160.800.000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	49.473.000.000	49.473.000.000
6	SATPOL PP	-	3.525.496.000	4.659.500.000	8.184.996.000
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	1.496.764.000	2.809.002.000	4.305.766.000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2.162.127.000	5.372.000.000	7.534.127.000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	5.034.433.000	8.482.752.000	13.517.185.000
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	1.490.586.000	3.149.500.000	4.640.086.000
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	121.472.000	13.017.335.000	28.248.500.000	41.265.835.000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	2.747.592.000	5.872.200.000	8.619.792.000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	2.996.636.000	1.436.866.000	4.433.502.000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	9.007.313.000	4.895.000.000	13.902.313.000
15	DINAS PERHUBUNGAN	1.438.674.500	5.714.844.000	16.538.000.000	22.252.844.000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	1.256.000.000	1.256.000.000
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.062.000.000	2.610.298.000	6.799.130.000	9.409.428.000
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	2.048.742.000	3.025.082.000	5.073.824.000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.296.285.265	4.221.585.000	21.085.377.642	25.306.962.642
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	3.300.000.000	9.540.813.000	19.070.769.000	28.611.582.000
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	10.277.495.000	-	10.277.495.000
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	767.037.000	-	767.037.000
23	SETDA	8.371.000.000	13.633.383.000	42.964.737.061	56.598.120.061
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	21.000.000	-	17.405.000.000	17.405.000.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	670.000.000	670.000.000
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	90.000.000	13.633.383.000	16.172.000.000	29.805.383.000
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	45.000.000	-	2.764.500.000	2.764.500.000
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	1.805.212.061	1.805.212.061
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	1.815.000.000	1.815.000.000
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	8.215.000.000	-	958.025.000	958.025.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	1.375.000.000	1.375.000.000
24	SEKRETARIAT DPRD	-	3.918.796.000	30.178.291.000	34.097.087.000
25	KECAMATAN REMBANG	-	5.297.447.000	4.295.326.000	9.592.773.000
26	KECAMATAN KALIORI	-	2.090.850.000	623.244.000	2.714.094.000
27	KECAMATAN SULANG	-	1.855.144.000	3.804.200.000	5.659.344.000
28	KECAMATAN SUMBER	-	1.725.568.000	698.139.000	2.423.707.000
29	KECAMATAN BULU	-	1.686.054.000	695.150.000	2.381.204.000
30	KECAMATAN LASEM	-	2.037.944.000	689.731.600	2.727.675.600
31	KECAMATAN PANCUR	-	2.077.469.000	684.400.000	2.761.869.000
32	KECAMATAN SLUKE	-	1.525.858.000	935.770.000	2.461.628.000
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	1.668.157.000	677.500.000	2.345.657.000
34	KECAMATAN GUNEM	-	1.677.129.000	548.887.000	2.226.016.000
35	KECAMATAN SALE	-	1.582.351.000	764.450.000	2.346.801.000
36	KECAMATAN KRAGAN	-	1.953.432.000	852.830.460	2.806.262.460
37	KECAMATAN SEDAN	-	1.757.607.000	762.593.000	2.520.200.000
38	KECAMATAN SARANG	-	2.164.526.000	522.960.000	2.687.486.000
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	3.360.065.000	6.220.000.000	9.580.065.000
40	BAPPEDA	-	3.473.933.000	5.604.500.000	9.078.433.000
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.394.593.282.917	376.828.458.721	16.287.467.000	393.115.925.721
a	(SKPD)	55.871.008.706	15.575.821.000	16.287.467.000	31.863.288.000
b	(PPKD)	1.338.722.274.211	361.252.637.721	-	361.252.637.721
42	BKD	-	3.767.503.000	6.049.500.000	9.817.003.000
	JUMLAH	1.554.357.348.866	1.097.000.502.721	641.066.765.647	1.738.067.268.368

REKAPITULASI
ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD 2017

NO.	SKPD	PEMBAHASAN		
		PENDAPATAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	2	9=6-3	10=7-4	11=9+10
1	DINPENDIKPORA	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	130.000.000	130.000.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	5.775.000.000	5.775.000.000
6	SATPOL PP	-	-	-
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	1.460.000.000	1.460.000.000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	38.000.000	38.000.000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	680.000.000	680.000.000
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	-
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	120.000.000	120.000.000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	270.000.000	270.000.000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	145.000.000	145.000.000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	(950.000.000)	(950.000.000)
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	(50.000.000)	(50.000.000)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(265.189.500)	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	405.000.000	405.000.000
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	200.000.000	200.000.000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	(100.000.000)	(100.000.000)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	-	75.000.000	75.000.000
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-
23	SETDA	-	-	-
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	(304.000.000)	(304.000.000)
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	150.000.000	150.000.000
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	100.000.000	100.000.000
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	(1.568.500.000)	(1.568.500.000)
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	1.464.500.000	1.464.500.000
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	(300.000.000)	(300.000.000)
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	(100.000.000)	(100.000.000)
24	SEKRETARIAT DPRD	-	(50.000.000)	(50.000.000)
25	KECAMATAN REMBANG	-	(300.000.000)	(300.000.000)
26	KECAMATAN KALIORI	-	-	-
27	KECAMATAN SULANG	-	-	-
28	KECAMATAN SUMBER	-	(150.000.000)	(150.000.000)
29	KECAMATAN BULU	-	-	-
30	KECAMATAN LASEM	-	-	-
31	KECAMATAN PANCUR	-	-	-
32	KECAMATAN SLUKE	-	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	50.000.000	50.000.000
34	KECAMATAN GUNEM	-	-	-
35	KECAMATAN SALE	-	-	-
36	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-
37	KECAMATAN SEDAN	-	-	-
38	KECAMATAN SARANG	-	-	-
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	780.000.000	780.000.000
40	BAPPEDA	-	-	-
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	500.000.000	(1.095.000.000)	(1.095.000.000)
a	(SKPD)	500.000.000	-	-
b	(PPKD)	-	(1.095.000.000)	(1.095.000.000)
42	BKD	-	-	-
	JUMLAH	234.810.500	(1.095.000.000)	8.093.000.000
			8.093.000.000	6.998.000.000

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		JUMLAH				
		R APBD 2017				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	DINAS KESEHATAN		292.600.000		42.627.034.184	42.919.634.184
2	RSU R. SOETRASNO				88.000.000.000	88.000.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		2.235.000.000		20.000.000	2.255.000.000
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		121.472.000			121.472.000
5	DINAS PERHUBUNGAN		1.703.864.000			1.703.864.000
6	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		1.019.000.000		43.000.000	1.062.000.000
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		12.107.919.265		188.366.000	12.296.285.265
8	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM		3.297.833.235		2.166.765	3.300.000.000
9	SEKRETARIAT DAERAH		156.000.000	8.215.000.000		8.371.000.000
	Bag. Umum		90.000.000			90.000.000
	Bag. Administrasi Perekonomian			8.215.000.000		8.215.000.000
	Bag. Kesejahteraan Rakyat		21.000.000			21.000.000
	Bag. Humas		45.000.000			45.000.000
10	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	45.678.500.000	200.000.000		9.492.508.706	55.371.008.706
	JUMLAH	45.678.500.000	21.133.888.500	8.215.000.000	140.373.075.655	215.400.284.155

EKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
 PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		PEMBAHASAN				
		PERSETUJUAN				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	8	9	10	11	12=8+9+10+11
1	DINAS KESEHATAN		292.600.000		42.627.034.184	42.919.634.184
2	RSU R. SOETRASNO				88.000.000.000	88.000.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		2.235.000.000		20.000.000	2.255.000.000
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		121.472.000			121.472.000
5	DINAS PERHUBUNGAN		1.438.674.500			1.438.674.500
6	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		1.019.000.000		43.000.000	1.062.000.000
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		12.167.919.265		128.366.000	12.296.285.265
8	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM		3.297.833.235		2.166.765	3.300.000.000
9	SEKRETARIAT DAERAH		156.000.000	8.215.000.000		8.371.000.000
	Bag. Umum		90.000.000			90.000.000
	Bag. Administrasi Perekonomian			8.215.000.000		8.215.000.000
	Bag. Kesejahteraan Rakyat		21.000.000			21.000.000
	Bag. Humas		45.000.000			45.000.000
10	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	46.178.500.000	200.000.000		9.492.508.706	55.871.008.706
	JUMLAH	46.178.500.000	20.928.499.000	8.215.000.000	140.313.075.655	215.635.074.655

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		PEMBAHASAN				
		BERTAMBAH(BERKURANG)				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	13=8-3	14=9-4	15=10-5	16=11-6	17=13+14+15+16
1	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-
2	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-
5	DINAS PERHUBUNGAN	-	(265.189.500)	-	-	(265.189.500)
6	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-	-
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	60.000.000	-	(60.000.000)	-
8	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-	-
9	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-
	Bag. Umum	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	-	-	-
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
	Bag. Humas	-	-	-	-	-
10	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	500.000.000	-	-	-	500.000.000
	JUMLAH	500.000.000	(205.189.500)	-	(60.000.000)	234.810.500

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	JUMLAH (Rp) RAPBD 2017							JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+4+5+6+7+8+9
1	DINPENDIKPORA	500.076.088.000							500.076.088.000
2	DINAS KESEHATAN	45.933.454.000							45.933.454.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	25.088.890.000							25.088.890.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.161.300.000							15.161.300.000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
6	SATPOL PP	3.525.496.000							3.525.496.000
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.496.764.000							1.496.764.000
8	BADAN PENANGGULANGAN	2.162.127.000							2.162.127.000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN	5.034.433.000							5.034.433.000
10	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.490.586.000							1.490.586.000
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	13.017.335.000							13.017.335.000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.747.592.000							2.747.592.000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	2.996.636.000							2.996.636.000
14	DINAS PEMBERDAYAAN	9.007.313.000							9.007.313.000
15	DINAS PERHUBUNGAN	5.714.844.000							5.714.844.000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN								
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN	2.610.298.000							2.610.298.000
18	DINAS KEARSIPAN DAN	2.048.742.000							2.048.742.000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.221.585.000							4.221.585.000
20	DINAS PERINDUSTRIAN,	9.540.813.000							9.540.813.000
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	10.277.495.000							10.277.495.000
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	767.037.000							767.037.000
23	SETDA	13.633.383.000							13.633.383.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN)								
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI)								
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	13.633.383.000							13.633.383.000
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)								
e	SETDA (BAGIAN TATA								
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)								
g	SETDA (BAGIAN ADM								
h	SETDA (BAGIAN ADM								
24	SEKRETARIAT DPRD	3.918.796.000							3.918.796.000
25	KECAMATAN REMBANG	5.297.447.000							5.297.447.000
26	KECAMATAN KALIORI	2.090.850.000							2.090.850.000
27	KECAMATAN SULANG	1.855.144.000							1.855.144.000
28	KECAMATAN SUMBER	1.725.568.000							1.725.568.000
29	KECAMATAN BULU	1.686.054.000							1.686.054.000
30	KECAMATAN LASEM	2.037.944.000							2.037.944.000
31	KECAMATAN PANCUR	2.077.469.000							2.077.469.000
32	KECAMATAN SLUKE	1.525.858.000							1.525.858.000
33	KECAMATAN PAMOTAN	1.668.157.000							1.668.157.000
34	KECAMATAN GUNEM	1.677.129.000							1.677.129.000
35	KECAMATAN SALE	1.582.351.000							1.582.351.000
36	KECAMATAN KRAGAN	1.953.432.000							1.953.432.000
37	KECAMATAN SEDAN	1.757.607.000							1.757.607.000
38	KECAMATAN SARANG	2.164.526.000							2.164.526.000
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	3.360.065.000							3.360.065.000
40	BAPPEDA	3.473.933.000							3.473.933.000
1	BADAN PENDAPATAN,	15.575.821.000	-	6.455.961.000	30.015.835.500	11.525.000.000	313.350.841.221	1.000.000.000	377.923.458.721
a	(SKPD)	15.575.821.000							15.575.821.000
b	(PPKD)			6.455.961.000	30.015.835.500	11.525.000.000	313.350.841.221	1.000.000.000	362.347.637.721
2	BKD	3.767.503.000							3.767.503.000
	JUMLAH	735.747.865.000	-	6.455.961.000	30.015.835.500	11.525.000.000	313.350.841.221	1.000.000.000	1.098.095.502.721

APITULASI
ANJA TIDAK LANGSUNG

ORGANISASI	PEMBAHASAN PERSETUJUAN							JUMLAH
	Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
2	11	12	13	14	15	16	17	18 = 11+12+13+14+15+16+17
DINPENDIKPORA	500.076.088.000							500.076.088.000
DINAS KESEHATAN	45.933.454.000							45.933.454.000
RSUD dr R. SOETRASNO	25.088.890.000							25.088.890.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.161.300.000							15.161.300.000
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SATPOL PP	3.525.496.000							3.525.496.000
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.496.764.000							1.496.764.000
BADAN PENANGGULANGAN	2.162.127.000							2.162.127.000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN	5.034.433.000							5.034.433.000
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.490.586.000							1.490.586.000
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	13.017.335.000							13.017.335.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.747.592.000							2.747.592.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN	2.996.636.000							2.996.636.000
DINAS PEMBERDAYAAN	9.007.313.000							9.007.313.000
DINAS PERHUBUNGAN	5.714.844.000							5.714.844.000
DINAS KOMUNIKASI DAN								
DINAS KEBUDAYAAN DAN	2.610.298.000							2.610.298.000
DINAS KEARSIPAN DAN	2.048.742.000							2.048.742.000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.221.585.000							4.221.585.000
DINAS PERINDUSTRIAN,	9.540.813.000							9.540.813.000
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	10.277.495.000							10.277.495.000
BUPATI DAN WAKIL BUPATI	767.037.000							767.037.000
SETDA	13.633.383.000							13.633.383.000
SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN								
SETDA (BAGIAN ORGANISASI								
SETDA (BAGIAN UMUM)	13.633.383.000							13.633.383.000
SETDA (BAGIAN HUMAS)								
SETDA (BAGIAN TATA								
SETDA (BAGIAN HUKUM)								
SETDA (BAGIAN ADM								
SETDA (BAGIAN ADM								
SEKRETARIAT DPRD	3.918.796.000							3.918.796.000
KECAMATAN REMBANG	5.297.447.000							5.297.447.000
KECAMATAN KALIORI	2.090.850.000							2.090.850.000
KECAMATAN SULANG	1.855.144.000							1.855.144.000
KECAMATAN SUMBER	1.725.568.000							1.725.568.000
KECAMATAN BULU	1.686.054.000							1.686.054.000
KECAMATAN LASEM	2.037.944.000							2.037.944.000
KECAMATAN PANCUR	2.077.469.000							2.077.469.000
KECAMATAN SLUKE	1.525.858.000							1.525.858.000
KECAMATAN PAMOTAN	1.668.157.000							1.668.157.000
KECAMATAN GUNEM	1.677.129.000							1.677.129.000
KECAMATAN SALE	1.582.351.000							1.582.351.000
KECAMATAN KRAGAN	1.953.432.000							1.953.432.000
KECAMATAN SEDAN	1.757.607.000							1.757.607.000
KECAMATAN SARANG	2.164.526.000							2.164.526.000
INSPEKTORAT KABUPATEN	3.360.065.000							3.360.065.000
BAPPEDA	3.473.933.000							3.473.933.000
BADAN PENDAPATAN,	15.575.821.000	-	6.455.961.000	27.114.202.500	11.375.000.000	315.307.474.221	1.000.000.000	376.828.458.721
(SKPD)	15.575.821.000							15.575.821.000
(PPKD)		-	6.455.961.000	27.114.202.500	11.375.000.000	315.307.474.221	1.000.000.000	361.252.637.721
BKD	3.767.503.000							3.767.503.000
JUMLAH	735.747.865.000	-	6.455.961.000	27.114.202.500	11.375.000.000	315.307.474.221	1.000.000.000	1.097.000.502.721

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	HASIL PEMBAHASAN BERTAMBAH (BERKURANG)							JUMLAH
		Belanja Pegawai 19 = 11-3	Belanja Bunga 20 = 12-4	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 21 = 13-5	Belanja Hibah 22 = 14-6	Belanja Bantuan Sosial 23 = 15-7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik 24 = 16-8	Belanja Tidak Terduga 25 = 17-9	
1	2								26=19+20+21+22+23+24+25
1	DINPENDIKPORA	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SATPOL PP	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BADAN PENANGGULANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DINAS KOMUNIKASI DAN	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DINAS KEARSIPAN DAN	-	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-
20	DINAS PERINDUSTRIAN,	-	-	-	-	-	-	-	-
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SETDA	-	-	-	-	-	-	-	-
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN TATA	-	-	-	-	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-	-	-	-	-
27	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-	-	-	-	-
28	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KECAMATAN BULU	-	-	-	-	-	-	-	-
30	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-	-	-	-	-
31	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-	-	-	-	-
32	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-	-	-	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-	-	-	-	-
34	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KECAMATAN SALE	-	-	-	-	-	-	-	-
36	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
37	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-	-	-	-	-
38	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-	-	-	-	-
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-	-	-	-	-	-
40	BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-
41	BADAN PENDAPATAN,	-	-	-	-	-	-	-	-
a	(SKPD)	-	-	(2.901.633.000)	(150.000.000)	1.956.633.000	-	(1.095.000.000)	-
b	(PPKD)	-	-	-	-	-	-	-	-
42	BKD	-	-	(2.901.633.000)	(150.000.000)	1.956.633.000	-	(1.095.000.000)	-
	JUMLAH	-	-	(2.901.633.000)	(150.000.000)	1.956.633.000	-	(1.095.000.000)	-

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	RAPBD 2017			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1	DINPENDIKPORA	15.440.166.000	11.674.930.000	53.165.900.700	80.280.996.700
2	DINAS KESEHATAN	31.099.629.176	18.552.135.508	8.766.782.500	58.418.547.184
3	RSUD dr R. SOETRASNO	44.832.244.000	34.533.645.000	22.839.478.000	102.205.367.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.189.754.000	1.501.246.000	83.533.500.000	88.224.500.000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	242.500.000	545.500.000	47.225.000.000	48.013.000.000
6	SATPOL PP	2.484.340.000	1.971.396.000	165.764.000	4.621.500.000
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.431.425.000	697.577.000	-	2.129.002.000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	800.005.000	1.471.995.000	3.100.000.000	5.372.000.000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.625.504.000	4.617.224.000	1.120.024.000	8.362.752.000
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1.101.490.000	1.762.260.000	15.750.000	2.879.500.000
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2.189.406.000	25.121.044.000	793.050.000	28.103.500.000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.639.635.000	3.692.065.000	1.490.500.000	6.822.200.000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	469.580.000	909.876.000	107.410.000	1.486.866.000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.160.988.000	3.076.313.000	252.699.000	4.490.000.000
15	DINAS PERHUBUNGAN	1.455.430.000	11.534.980.000	3.347.590.000	16.338.000.000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	548.975.000	750.529.000	56.496.000	1.356.000.000
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	898.410.000	1.550.220.000	4.275.500.000	6.724.130.000
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	601.009.000	1.661.657.000	762.416.000	3.025.082.000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.413.956.000	4.995.016.000	12.552.405.642	21.961.377.642
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	1.690.279.000	2.778.931.000	13.806.559.000	18.275.769.000
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	-	-	-	-
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	19.509.080.000	20.729.577.061	3.030.080.000	43.268.737.061
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	13.312.600.000	3.841.400.000	101.000.000	17.255.000.000
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	197.150.000	358.115.000	14.735.000	570.000.000
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	2.126.125.000	13.232.515.000	2.381.860.000	17.740.500.000
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	269.500.000	836.090.000	194.410.000	1.300.000.000
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	858.355.000	963.257.061	283.600.000	2.105.212.061
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	1.262.230.000	639.195.000	13.575.000	1.915.000.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	356.120.000	582.905.000	19.000.000	958.025.000
24	SEKRETARIAT DPRD	1.127.000.000	276.100.000	21.900.000	1.425.000.000
25	KECAMATAN REMBANG	2.970.738.000	26.802.758.000	704.795.000	30.478.291.000
26	KECAMATAN KALIORI	1.212.455.000	1.096.701.400	1.986.169.600	4.295.326.000
27	KECAMATAN SULANG	236.306.000	265.098.000	121.840.000	623.244.000
28	KECAMATAN SUMBER	374.094.000	319.906.000	3.260.200.000	3.954.200.000
29	KECAMATAN BULU	246.235.000	301.534.000	150.370.000	698.139.000
30	KECAMATAN LASEM	250.925.000	220.625.000	223.600.000	695.150.000
31	KECAMATAN PANCUR	231.536.800	277.980.800	180.214.000	689.731.600
32	KECAMATAN SLUKE	239.360.000	251.240.000	193.800.000	684.400.000
33	KECAMATAN PAMOTAN	296.855.000	283.940.000	304.975.000	885.770.000
34	KECAMATAN GUNEM	271.965.000	260.535.000	145.000.000	677.500.000
35	KECAMATAN SALE	212.350.000	191.845.000	144.692.000	548.887.000
36	KECAMATAN KRAGAN	282.040.000	267.220.000	215.190.000	764.450.000
37	KECAMATAN SEDAN	230.334.000	415.612.460	206.884.000	852.830.460
38	KECAMATAN SARANG	344.850.000	202.493.000	215.250.000	762.593.000
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	240.200.000	275.760.000	7.000.000	522.960.000
40	BAPPEDA	4.208.990.000	1.205.810.000	25.200.000	5.440.000.000
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.912.706.000	3.640.844.000	50.950.000	5.604.500.000
a	(SKPD)	5.420.917.500	6.858.389.500	4.008.160.000	16.287.467.000
b	(PPKD)	-	-	-	-
42	BKD	2.864.294.500	3.203.205.500	82.000.000	6.149.500.000
	JUMLAH	159.870.956.976	200.469.614.229	272.633.194.442	632.973.765.647

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PERSETUJUAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9
1	DINPENDIKPORA	15.509.238.000	11.485.758.000	53.416.000.700	80.410.996.700
2	DINAS KESEHATAN	31.115.768.176	18.415.796.508	8.886.982.500	58.418.547.184
3	RSUD dr R. SOETRASNO	44.832.244.000	32.772.845.000	24.600.278.000	102.205.367.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.379.754.000	2.536.246.000	88.083.500.000	93.999.500.000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	412.950.000	675.050.000	48.385.000.000	49.473.000.000
6	SATPOL PP	2.541.090.000	1.932.534.000	185.876.000	4.659.500.000
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.786.570.000	1.022.432.000	-	2.809.002.000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	800.005.000	1.471.995.000	3.100.000.000	5.372.000.000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.764.711.000	4.600.541.000	1.117.500.000	8.482.752.000
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1.089.220.000	2.044.530.000	15.750.000	3.149.500.000
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2.349.326.000	24.866.124.000	1.033.050.000	28.248.500.000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.633.555.000	3.372.645.000	866.000.000	5.872.200.000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	467.305.000	862.151.000	107.410.000	1.436.866.000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.211.265.000	3.424.235.000	259.500.000	4.895.000.000
15	DINAS PERHUBUNGAN	1.458.130.000	11.582.280.000	3.497.590.000	16.538.000.000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	496.800.000	703.424.000	55.776.000	1.256.000.000
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	886.910.000	1.644.220.000	4.268.000.000	6.799.130.000
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	601.009.000	1.661.657.000	762.416.000	3.025.082.000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.339.036.000	4.668.836.000	12.077.505.642	21.085.377.642
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	1.876.179.000	3.181.306.000	14.013.284.000	19.070.769.000
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	-	-	-	-
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	19.734.730.000	20.632.027.061	2.597.980.000	42.964.737.061
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	13.404.200.000	3.899.800.000	101.000.000	17.405.000.000
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	217.400.000	424.015.000	28.585.000	670.000.000
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	1.859.850.000	12.209.390.000	2.102.760.000	16.172.000.000
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	658.100.000	1.795.240.000	311.160.000	2.764.500.000
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	861.080.000	944.132.061	-	1.805.212.061
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	1.256.530.000	544.895.000	13.575.000	1.815.000.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	356.120.000	582.905.000	19.000.000	958.025.000
4	SEKRETARIAT DPRD	1.121.450.000	231.650.000	21.900.000	1.375.000.000
5	KECAMATAN REMBANG	2.917.938.000	26.363.213.000	897.140.000	30.178.291.000
6	KECAMATAN KALIORI	1.212.455.000	1.096.701.400	1.986.169.600	4.295.326.000
7	KECAMATAN SULANG	236.306.000	265.098.000	121.840.000	623.244.000
8	KECAMATAN SUMBER	374.094.000	319.906.000	3.110.200.000	3.804.200.000
9	KECAMATAN BULU	246.235.000	301.534.000	150.370.000	698.139.000
0	KECAMATAN LASEM	250.925.000	220.625.000	223.600.000	695.150.000
1	KECAMATAN PANCUR	231.536.800	277.980.800	180.214.000	689.731.600
2	KECAMATAN SLUKE	239.360.000	251.240.000	193.800.000	684.400.000
3	KECAMATAN PAMOTAN	284.855.000	345.940.000	304.975.000	935.770.000
4	KECAMATAN GUNEM	271.965.000	260.535.000	145.000.000	677.500.000
5	KECAMATAN SALE	212.350.000	191.845.000	144.692.000	548.887.000
6	KECAMATAN KRAGAN	282.040.000	267.220.000	215.190.000	764.450.000
7	KECAMATAN SEDAN	230.334.000	415.612.460	206.884.000	852.830.460
8	KECAMATAN SARANG	344.850.000	202.493.000	215.250.000	762.593.000
9	INSPEKTORAT KABUPATEN	240.200.000	275.760.000	7.000.000	522.960.000
1	BAPPEDA	4.328.390.000	1.839.609.000	52.001.000	6.220.000.000
1	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.912.706.000	3.633.844.000	57.950.000	5.604.500.000
a	(SKPD)	5.420.917.500	6.853.389.500	4.013.160.000	16.287.467.000
b	(PPKD)	5.420.917.500	6.853.389.500	4.013.160.000	16.287.467.000
	BKD	-	-	-	-
	JUMLAH	2.887.512.500	3.049.787.500	112.200.000	6.049.500.000
		161.410.764.976	199.988.966.229	279.667.034.442	641.066.765.647

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4	13 = 9 - 5	14 = 11+12+13
1	DINPENDIKPORA	69.072.000	(189.172.000)	250.100.000	130.000.000
2	DINAS KESEHATAN	16.139.000	(136.339.000)	120.200.000	-
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	(1.760.800.000)	1.760.800.000	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	190.000.000	1.035.000.000	4.550.000.000	5.775.000.000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	170.450.000	129.550.000	1.160.000.000	1.460.000.000
6	SATPOL PP	56.750.000	(38.862.000)	20.112.000	38.000.000
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	355.145.000	324.855.000	-	680.000.000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	139.207.000	(16.683.000)	(2.524.000)	120.000.000
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(12.270.000)	282.270.000	-	270.000.000
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	159.920.000	(254.920.000)	240.000.000	145.000.000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(6.080.000)	(319.420.000)	(624.500.000)	(950.000.000)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(2.275.000)	(47.725.000)	-	(50.000.000)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	50.277.000	347.922.000	6.801.000	405.000.000
15	DINAS PERHUBUNGAN	2.700.000	47.300.000	150.000.000	200.000.000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(52.175.000)	(47.105.000)	(720.000)	(100.000.000)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(11.500.000)	94.000.000	(7.500.000)	75.000.000
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(74.920.000)	(326.180.000)	(474.900.000)	(876.000.000)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	185.900.000	402.375.000	206.725.000	795.000.000
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	-	-	-	-
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	225.650.000	(97.550.000)	(432.100.000)	(304.000.000)
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	91.600.000	58.400.000	-	150.000.000
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	20.250.000	65.900.000	13.850.000	100.000.000
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	(266.275.000)	(1.023.125.000)	(279.100.000)	(1.568.500.000)
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	388.600.000	959.150.000	116.750.000	1.464.500.000
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	2.725.000	(19.125.000)	(283.600.000)	(300.000.000)
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	(5.700.000)	(94.300.000)	-	(100.000.000)
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-
24	SEKRETARIAT DPRD	(5.550.000)	(44.450.000)	-	(50.000.000)
25	KECAMATAN REMBANG	(52.800.000)	(439.545.000)	192.345.000	(300.000.000)
26	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-
27	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-
28	KECAMATAN SUMBER	-	-	(150.000.000)	(150.000.000)
29	KECAMATAN BULU	-	-	-	-
30	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-
31	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-
32	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	(12.000.000)	62.000.000	-	50.000.000
34	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-
35	KECAMATAN SALE	-	-	-	-
36	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-
37	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-
38	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	119.400.000	633.799.000	26.801.000	780.000.000
40	BAPPEDA	-	(7.000.000)	7.000.000	-
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	(5.000.000)	5.000.000	-
a	(SKPD)	-	(5.000.000)	5.000.000	-
b	(PPKD)	-	-	-	-
42	BKD	23.218.000	(153.418.000)	30.200.000	(100.000.000)
	JUMLAH	1.539.808.000	(480.648.000)	7.033.840.000	8.093.000.000

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan guna Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 29 November 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG BADAN ANGGARAN

Ketua,

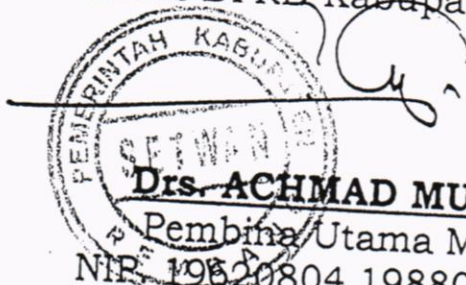
Sekretaris

ttd

ttd

H. MAJID KAMIL MZ Drs. ACHMAD MUALIF

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang


Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19820804 198803 1 011

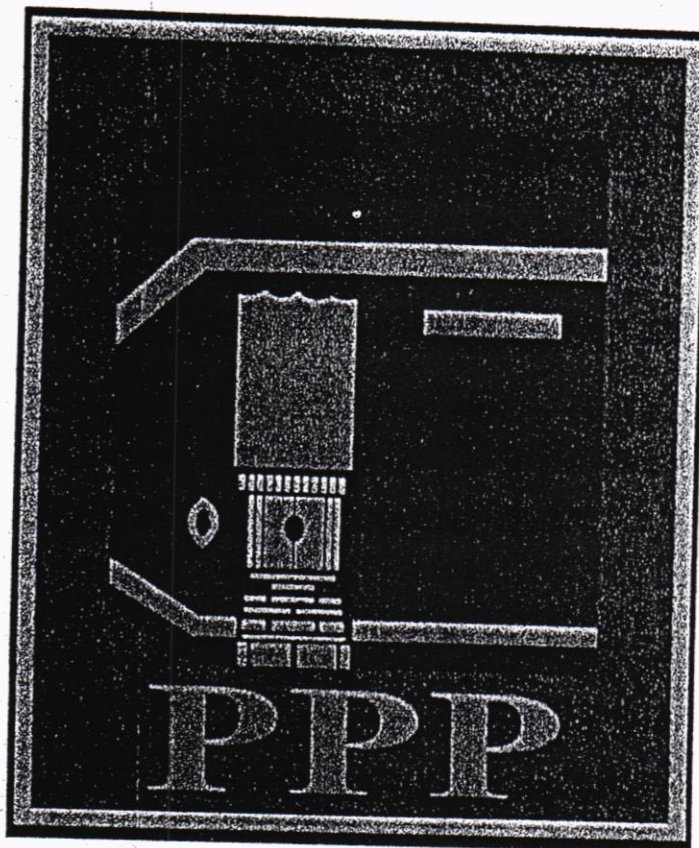
PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KABUPATEN REMBANG

A T A S

RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Hari : Selasa , 29 Nopember 2016
Dibacakan Oleh : HENRY PURWOKO, Spd.**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
JL. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212 Rembang**



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2017

Selasa , 29 Nopember 2016

Dibacakan oleh : HENRY PURWOKO, Spd.

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

Bismillah., Alhamdulillah., Assholatu Wassalamu a'la Rosulilla., Wa'alaah alihi wasohbihi wamawwalah., laahaula wala quwwata illabillah..., Amma ba'da.....

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.

- => sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami menyampaikan Pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir mengikuti Rapat Paripurna DPRD ini , dalam keadaan sehat Wal afiat, tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW , dan para shahabat , beserta seluruh keluarganya.

Bp. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pendapat akhir kami, terhadap Rancangan Perda, tentang APBD Kabupaten Rembang tahun 2017, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi langkah Pemkab. Yang telah menaikkan honor guru madin, dan tunjangan gtt dan ptt walaupun belum sesuai UMK karena keterbatasan Anggaran kedepan kami meminta agar terus ditingkatkan setidaknya sesuai dengan UMK. Dan setelah mendengarkan jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan oleh sdr. Bupati , dalam rapat paripurna ke II , pada hari Rabu , tanggal 23 Nopember 2016 , terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi , dan selanjutnya dilakukan pembahasan melalui rapat-rapat di Komisi , bersama dengan SKPD terakait , Rapat Banggar dan Pimpinan Komisi , dan Rapat Banggar dengan TAPD , Alkhamdulillah semua dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan , meskipun harus lembur sampai waktu malam, dan sempat dilakukan penundaan waktu didalam rapat pembahasan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, dari hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah , tentang APBD tahun 2017 ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , ***Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrochiim menerima dan menyetujui , RAPERDA*** Tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ini , untuk

dapat di tetapkan menjadi **PERDA**, Tentang APBD Tahun Anggaran 2017 , dengan segala perubahan dan pergeseran yang ada , di dalam waktu pembahasannya.

Di dalam Pendapat akhir ini , ada beberapa catatan dan masukan yang perlu kami sampaikan , untuk evaluasi sekaligus perbaikan Pemerintahan ke depan, di antaranya sebagai berikut :

1. Kami meminta kepada Sdr. Bupati dan TAPD agar ke depan pembahasan KUA PPAS dan APBD induk bisa tepat waktu, khususnya untuk RAPBD Perubahan 2017 Juli harus sudah di bahas. Ketepatan waktu ini penting agar tidak terkesan mepet dan tewrgesa – gesa dalam pembahasan, waktu yang cukup dan longgar dalam pembahasan akan memberikan ruang yang cukup bagi masing – masing komisi untuk mendalami setiap program SKPD. Di samping itu juga memacu kinerja SKPD untuk melaksanakan program-programnya mulai dari awal tahun Anggaran. Sehingga tidak terkesan melaksanakan program selalu menumpuk akhir tahun .
2. Kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi kerja keras Sdr. Bupati yang selalu mengevaluasi tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2016 tiap minggu sekali, semata-mata agar program dan kegiatan segera berkjalan dan dapat dirasakan masyarakat . Terkait dengan Anggaran 2017 yang akan disahkan pada hari ini dan sesuai hasil rapat di tingkat Komisi bersama SKPD , dalam pembahasan telah disepakati bahwa, program kegiatan yang tercantum didalam Rancangan APBD tahun 2017 ini, adalah prioritas kegiatan yang 95 % dapat dilaksanakan . Maka sehubungan dengan hal tersebut , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada Pemkab , supaya komitmen yang sudah disepakati ini benar-benar dilaksanakan. Dan tidak ada alasan lagi SKPD tidak bisa menjalankan atau tidak berani menjalankan program. Kami berharap ada sanksi yang tegas bagi SKPD yang penyerapannya tidak sesuai target, dan Pejabat yang tidak berani menjalankan program tanpa alasan yang kuat dan mendasar. Demi menjunjung tinggi sikap propesionalisme sebagai Apatur Negara.
3. Kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga mengapresiasi struktur RAPBD 2017 yang akan kita sahkan, yang lebih mendorong belanja langsung/ publik dan mengurangi belanja rutin , hal ini akan lebih menghemat dan tepat sasaran, sehingga tidak terkesan belanja Aparatur lebih gemuk dari belanja publik. Ke depan, dalam rangka menunjang peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perdesaan , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon, kepada Pemkab Rembang , agar Program Pembangunan lebih di proritaskan pada kegiatan :
 - a. Sarana Perhubungan yang baik dan lancar , yakni Perbaikan dan Peningkatan Jalan antar Kecamatan , dan Jalan antar desa .
 - b. Sarana Penunjang Pertanian yang baik dan berfungsi , yakni Revitalisasi Jaringan Irigasi , Perbaikan dan Pembangunan Embung atau Bendung , serta Peningkatan SDA (Sumber Daya Air).

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 ini , Semoga kita selalu diberikan hidayah , kemudahan, dan kelancaran, sehingga apa yang kita rencanakan dapat berhasil dan bermanfaat, untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wallahul Muwaffiq Ilaa aqwamitthoorik

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 29 Nopembwer 2016


**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

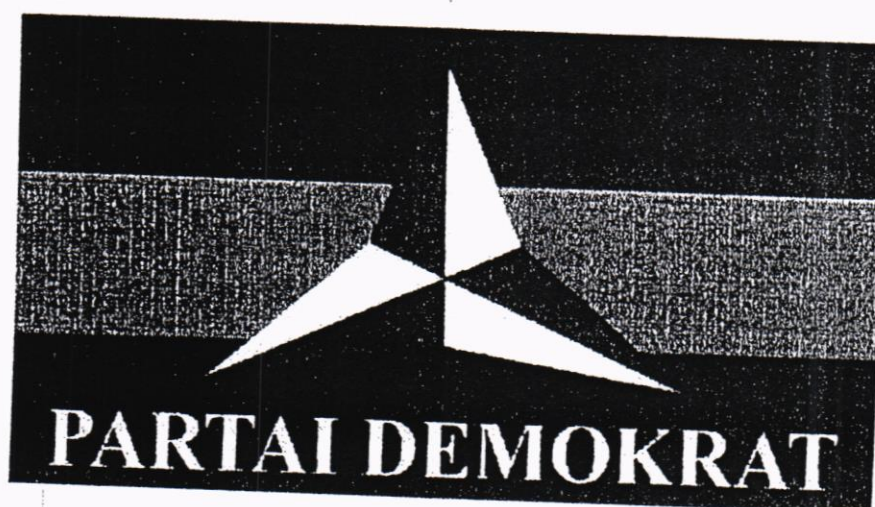

SUGIHARTO



SEKRETARIS


ZAIMUL UMAM NS

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Rembang, 29 NOPEMBER 2016
Dibacakan oleh : EDI KARTONO, SPd., MH.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

SELASA, 29 NOPEMBER 2016

Dibacakan oleh : EDI KARTONO, SPd., MH.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, marilah kita tidak henti-hentinya puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan lahir dan batin sehingga kita dapat

mengikuti rapat paripurna dalam rangka penetapan Raperda APBD 2017 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Rembang dengan baik.

Dalam penyampaian awal ini kami memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada masyarakat rembang dimana tidak terpengaruh atau terprovokasi dengan isu-isu yang memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa kita, sekali lagi kami Fraksi Demokrat mengucapkan banyak terima kasih.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Syukur alhamdulillah tahapan demi tahapan pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2017 mulai dari penyampaian, pembahasan ditingkat komisi, banggar berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal, sehingga Raperda Tahun Anggaran 2017 bisa terselesaikan dengan baik walaupun dengan waktu pembahasan yang sangat singkat.

Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiimi Kami Fraksi Demokrat **Menyetujui** RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi PERDA APBD Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk ditindak lanjuti, antara lain :

1. Kami Fraksi Demokrat meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rembang supaya dalam pelaksanaanya semua program yang telah disepakati supaya dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, karena dalam pembahasan kita sudah bersusah payah dan jangan hanya membuang energi dengan sia-sia.
2. Kami Fraksi Demokrat berharap dalam pelaksanaan APBD nanti agar Bupati benar-benar selalu memonitoring penyerapan dan kualitas pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, jangan

sampai seperti tahun-tahun sebelumnya yang tidak mau melaksanakan kegiatan.

3. Kami Fraksi Demokrat berharap dalam penempatan pejabat baru di SOTK nanti benar-benar yang kredibel yang mau dan mampu bekerja keras demi Rembang dan harus berani mengambil kebijakan-kebijakan yang benar dan strategis supaya penyerapan anggaran tahun 2017 nanti bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 29 Nopember 2016

FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

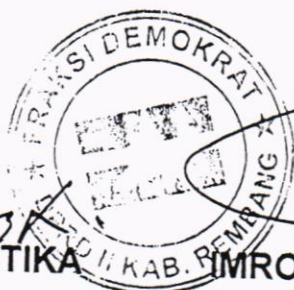
KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS


EKA SISWA KARTIKA


IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPEERDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

disampaikan oleh muhammad asnawi
pada sidang paripurna dprd kabupaten rembang, selasa, 29 Nopember 2016

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang.

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Plt. Sekretaris Daerah dan para calon Sekretaris Daerah serta Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Kita patut berbangga dengan keberhasilan Timnas sepakbola (PSSI) yang dengan perjuangan gigih mampu masuk semifinal Piala AFF. Boas Salosa, Lerby, Lilipali, Fahrudin. Lestahulu adalah nama nama yang mencerminkan kebhinekaan. Inilah cermin bahwa kebhinekaan Nusantara menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia. Seperti halnya kita berbangga dengan Tontowi Ahmad dan Lilyana Natsir yang berbeda suku dan agama mampu mengharumkan Indonesia dengan emas olimpiade.

Pemahaman keberagaman itu sangat penting karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Terdiri dari 17 ribu lebih pulau, 516 kabupaten/kota. Indonesia mempunyai keanekaragaman yang tidak dimiliki negara manapun di dunia. Ada 700 suku bangsa dan 1.100 bahasa lokal, serta adat-istiadat yang berbeda. "Betapa kita ini sangat beragam,"

Kebhinekaan ini adalah pemberian dari Tuhan yang harus dijaga. Masyarakat harus bersatu dalam kehidupan yang rukun dan damai. "Hal-hal seperti ini yang harus disampaikan pada anak didik generasi kita, bahwa kita semua bersaudara."

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan selamat Hari Guru, 27 Nopember, bahwa kita bisa seperti ini karena jasa Guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Presiden Jokowi dalam hari Guru menyampaikan pesan, agar para guru menanamkan nilai-nilai karakter pada anak didik, seperti kerja keras, kejujuran, kedisiplinan, optimisme. "Mohon agar ini disuntikan pada anak-anak, etika mengormati guru, orang tua, seniornya, karena ini nilai-nilai bangsa Indonesia," katanya.

Presiden menambahkan pelajaran seperti matematika, fisika, biologi, PKN, dan sebagainya memang diperlukan. Namun penanaman nilai-nilai pembentukan karakter juga diperlukan. Apalagi, Indonesia menghadapi persaingan global dengan bangsa-bangsa lain, sehingga karakter bangsa perlu ditanamkan sejak dini.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Kami Mulyakan

Media sosial saat ini sudah sangat terbuka dan tidak bisa kita hambat dengan cara apa pun. Sayangnya, medsos justru digunakan untuk saling hujat, menjelekkan antar anak bangsa, saling memaki, memfitnah, adu domba. Semua ini sekarang ada di media sosial. Dan ini bukan tata nilai bangsa Indonesia,".

Salah satu cara untuk mencegah medsos digunakan untuk hal-hal negatif adalah menanamkan peserta didik dengan karakter dan nilai-nilai yang positif. Peran ini menjadi tugas bagi guru dalam mendidik siswa. Agar anak abak kita, generasi muda kita diajak bermedia sosial yang santun, dengan tata nilai yang baik, ke arah positif.

Sebagai warga Rembang kita beruntung karena memiliki tokoh ulama KH. Maimun Zubair dan KH. Ahmad Mustofa Bisri yang telah memberi kita teladan dengan ahlaqul karimah. Mereka yang menghina dan menghujat beliau sudah dimaafkan sebelum mereka meminta maaf. Seperti kesaksian Pandu Wijaya dan Mawal Saibah, sowan beliau beliau yang tadinya takut dan merasa bersalah menjadi sejuk dan damai.

Media sosial seperti belajar tanpa guru, seperti mengambil air bukan dari sumber aslinya. Mereka yang belajar tanpa guru tak akan pernah mendapatkan HIKMAH yang selalu diajarkan oleh para guru. Pada akhirnya mudah terprovokasi dan tanpa belas kasihan menuduh memfitnah orang lain tanpa dasar yang kuat. Dunia maya seperti belantara dengan hukum rimba, siapa yang paling kuat memprovokasi itulah yang dianut.

Seperti yang didawuhkan KH. Maemun Zubair dan Gus Mus, lakukan tabayun dulu sebelum share informasi. Kalau mereka ingin marah secara pribadi oleh Gus Mus malah diberikan nomer Watshap beliau. Jangan mengumbar kebencian secara terbuka di media sosial.

Pimpina Sidang, Saudara Bupati dan Hadirin Yang Kami Hormati

RAPBD tahun 2017 kabupaten Rembang hanya bertambah 500.000.000 dari tahun rancangan tahun 2016 menjadi 1.554.622.536.386, artinya TAPD kabupaten Rembang memilih prinsip konservatif ketimbang prinsip akseleratif.

Dalam melakukan proyeksi pendapatan juga memilih prinsip konservatif, hampir tidak ada pendapatan yang signifikan dari PAD, Dana Perimbangan, Dan Lain lain Pendapatan Daerah yang sah. Ini artinya dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pembangunan di Rembang juga akan dilakukan secara konservatif.

Sedang dalam belanja daerah, masih didominasi dengan belanja tak langsung sebesar 1,087 triliun yang belanja pegawainya sendiri mencapai 735 milyar, hampir separo dari pendapatan daerah. Belanja langsungnya untuk belanja modal masih minim hanya sebesar 276 milyar dari belanja langsung sebesar 634 milyar.

Hemat kami belanja pegawai pada belanja langsung sebesar 160 milyar masih bisa dilakukan efisiensi sebagai "tabungan" pembahasan Perubahan APBD.

Dengan kondisi ini dan dimulai dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim*, FPKB dapat menerima RAPBD tahun 2017 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Perda APBD tahun 2017.

Sebagi penutup kami sampaikan salam damai untuk terus menjaga kebhinekaan kita, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Mayoritas menyayangi yang minoritas dan minoritas menghormati mayoritas.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 29 Nopember 2016

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua

TTD

Muhammad Imron.



Sekretaris

TTD

Ilyas



PDI PERJUANGAN



PARTAI NasDem

FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Tanggal : 29 Nopember 2016

TENTANG : RAPERDA APBD 2017

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) Kab.
Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag di lingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Para Tamu Undangan yang Berbahagia.

Yang Terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang beserta jajaran dan staf,

Dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak
yang hadir pada sidang hari ini yang kami hormati

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur ke hadirat ALLAH SWT atas nikmatnya lah kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa kami juga menyampaikan selamat HUT KORPRI ke - 45 yang jatuh pada hari ini, semoga KORPRI semakin berkualitas dan profesional .

Kami bersyukur dalam proses pembahasan beberapa hari ini dapat berjalan dengan lancar walaupun masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki . Dalam menyampaikan pendapat akhir atas Raperda APBD tahun anggaran 2017 kali ini, kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya :

1. Dengan digabungkannya Dinas Pendidikan dengan Dinas Pemuda dan Olah Raga maka kami berharap dalam penempatan seorang kepala Dinas harus benar – benar seseorang yang kompeten dibidang tersebut. Karena pada saat sebelum digabungpun kami melihat masih banyak kegiatan yang tidak bisa terlaksana. Oleh karena itu kami berharap siapapun nanti yang di tempatkan sebagai Kepala Dinas tersebut adalah seseorang yang mau bekerja keras, sehingga kegiatan yang sudah tersusun dan di anggarkan dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Kami menghimbau kepada Sdr. Bupati setelah RAPERDA APBD T.A 2017 ini disahkan menjadi PERDA APBD T.A 2017, segera mempersiapkan teknis pelaksanaan semua kegiatan yang ada di setiap SKPD dengan baik sehingga anggaran dapat terserap dengan baik. Dengan kata lain jangan sampai ada anggaran yang tidak terserap.
3. Untuk program yang menyangkut dengan pelayanan public sebelum dilaksanakan harus di sosialisasikan terlebih dahulu dan di pantau atau di awasi pelaksanaanya.

Karena selama ini banyak arahan Bupati yang tidak dilaksanakan oleh jajaran SKPD sampai tingkat lurah, contohnya Program BPJS PBI dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan)

4. Hari ini ada sosialisasi tentang nasib masyarakat nelayan cantrang di Bogor, kami berharap semoga pihak eksekutif dan legislative bisa memperjuangkan minimal memberikan solusi dan jalan keluar terbaik untuk masyarakat. Sehingga perekonomian masyarakat khususnya nelayan dan masyarakat Rembang, yang pada umumnya merupakan nelayan dan buruh cantrang dapat tetap berjalan.
5. Sesuai dengan visi dan misi Bupati yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur maka kami berharap Bupati mempersiapkan Sumber Daya Manusia dilingkungan Dinas PU, kami khawatir dengan anggaran yang begitu besar PU tidak dapat melaksankannya.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,

Dengan segala pertimbangan kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem di akhir penyampaian pendapat akhir ini, dengan mengucap “ **Bismillahirrohmanirrohim**” kami menyatakan dengan ini “ **Menyetujui** “ RAPERDA APBD T.A 2017 ini untuk disahkan menjadi PERDA APBD T.A 2017.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem terima kasih atas perhatiannya, apabila ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamu' alaikum wr. Wb.

M E R D E K A.!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

KAB. REMBANG

KETUA


JASMANI

SEKRETARIS


ALA IRCHAM ST

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS

RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017



REMBANG, 29 NOVEMBER 2017

Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

Disampaikan oleh puji santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 29 November 2016

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;
Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri
Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI
Yang kami hormati Sdr. Pj. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat dilingkungan
Pemb. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;
Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas,
Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi, dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada ILLAHI ROBBI atas segala karunia dan nikmat NYA yang tiada henti. Sholawat dan salam teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW segenap para nabi dan rasul ILLAHI.

Hadirin sidang paripurna yang kami Hormati,

Setelah melalui berbagai tahapan dalam pembahasan Rencana APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017, dalam Rapat Komisi-Komisi, Rapat Banggar, dan Rapat Fraksi, Kami sampaikan catatan penting sebagai berikut :

- Dengan bertambahnya Belanja Daerah yang hampir mencapai angka 1,554 Trilyun dan belum ada Penambahan dana DAK maupun Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Privinsi, maka diperlukan pengelolaan keuangan yang sangat cerdas agar semua anggaran yang tertuang di APBD tahun 2017 bisa terserap secara maksimal dalam kurun waktu 1 tahun kedepan. Kami berharap untuk kegiatan-kegiatan yang Anggaranya cukup besar dan harus

dilelang agar didahulukan pelaksanaannya agar memperoleh waktu yang cukup. Kita buktikan bahwa Perencanaan yang ada di Kabupaten Rembang benar-benar merupakan sebuah Perencanaan yang sangat matang dan bukan asal-asalan. Kita buktikan bahwa semua unsur Pemerintahan yang ada di Kabupaten Rembang bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga laju Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang bisa berjalan lancar dan normal, Penyerapan Anggaran juga berjalan baik serta masyarakat bisa menikmati dampak dari pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

- Pada dasarnya pengelolaan APBD itu didasarkan pada 3 kepentingan yaitu untuk Penyelenggara Pemerintahan, untuk Pelayanan Masyarakat dan untuk Pembangunan Infrastruktur. Didalam Pos Belanja Langsung, dimana Prosentase Belanja Modal masih terlalu kecil yaitu sebesar 43,63 %, semetara belanja Barang dan jasa sebesar 31,20 % dan Belanja Pegawai sebesar 25,18 %. Kedepan fraksi Gerindra mengharap kepada Pemerintah Kabupaten Rembang bisa menaikkan Belanja Modal dalam kisaran 50 – 60 %. Karena ini akan berdampak Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Rembang.
- Sesuai dengan hasil Audit BPK pada beberapa tahun yang lalu, disebutkan bahwa PT. RBSJ akan segera memberikan Deviden kepada Pemerintah kabupaten Rembang, tetapi pada kenyataanya sampai batas akhir pembahasan APBD Induk tahun 2017 ini juga tidak memberikan setoran. Berarti PT. RBSJ telah mengingkari apa yang telah di amanahkan Lembaga Audit Resmi dari Pemerintah. Kami berharap Pemerintah Kabupaten Rembang segera mengambil tindakan pada Perusahaan yang kita miliki sendiri tersebut.
- Kami Fraksi Gerindra memohon kepada Pemerintah Kabupaten Rembang terkait tindak lanjut atas Hasil Audit BPKP terkait Pelabuhan Tanjung Bonang-Sluke. Jangan sampai Pemerintah Kabupaten Rembang mendapat teguran kembali dari Lembaga Audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah. Kita semua berharap agar Pelabuhan tersebut bisa segera terbangun sesuai standart pelabuhan yang layak untuk di gunakan.

Demikian pendapat akhir kami, dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, kami menerima Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Perda. Atas segala

kekurangannya disampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi kita semua.

Billahitaufig wal hidaayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 29 Nopember 2016

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG

Ttd

H. CHASANNUDIN

Wakil Ketua



Ttd

PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



**PENDAPAT FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**ATAS RAPERDA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TA. 2017**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Selasa, 29 Nopember 2016**

Assalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.

Yang kami hormati

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- Saudara Pimpinan dan semua Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Saudara Penjabat Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di kalangan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Para hadirin yang kami muliakan.

Segala puji bagi Allah yang melimpahkan taufik rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah selaku abdi masyarakat dan abdi negara.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah melalui pembahasan antara komisi-komisi bersama SKPD terkait dan dilanjutkan pembahasan antara TAPD bersama Banggar DPRD maka saatnya kami menyampaikan Pendapat Fraksi Karya Sejahtera atas Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang TA 2017 sbb.

- Fraksi Karya Sejahtera memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan anggota DPRD, SKPD dan staf Sekretariat DPRD yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan RAPBD Kabupaten Rembang TA 2017 ini sampai selesai.
- Dengan pengalaman APBD TA 2016 dimana terjadi penumpukan anggaran pada akhir tahun yang tidak bisa terlaksana secara maksimal, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, Fraksi Karya Sejahtera mengharapkan agar APBD TA 2017 nanti dilaksanakan secara optimal sehingga tidak menyisakan SILPA yang besar dan memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Rembang.

Dengan demikian Fraksi Karya Sejahtera menyetujui RAPBD Kabupaten Rembang TA 2017 ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Rembang TA 2017.

Pimpinan Sidang dan para hadirin sekalian.

Sebelum mengakhiri pendapat akhir ini perkenankanlah kami mengutip pesan Prabu Yudhistira ketika mewisuda Raden Parikesit sebagai penerus Kerajaan Amarta, piweling 3 H (telu ha), yaitu “hamong, hamot lan hamemangkat”

1. Hamong, seorang pemimpin/raja harus sanggup berperan sebagai pamomong yaitu orang yang melayani bukan minta dilayani. Sebagai abdi masyarakat menuntut sikap tidak mudah mencela.

2. **Hamot** , berarti mampu menerima atau mewartahi semua hal yang didengar atau disampaikan oleh orang lain, mendengarkan keluhan dan aspirasi dari rakyat
3. **Hamemangkat** , menjaga derajat dan kedudukan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin/raja harus menjaga martabat pribadi dan negara dengan menjaga tingkah laku yang baik dan menjadi panutan dan suri tauladan bagi rakyatnya.

Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Rahayu ingkang samya pinanggih - Wassalamu'alaikum wa rohmattullohi wa barokatuh.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,



H. ISMARI



Sekretaris,



JOKO SUPRIHADI, SH

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PENDAPAT AKHIR
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Dibacakan Oleh : Sahningsih, SE

Yang Terhormat,
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.
Camat se Kabupaten Rembang
Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan
Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan
Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD T.A 2017 dalam keadaan
sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Kami dari fraksi Harapan perlu menyampaikan terkait besarnya Belanja Pegawai pada rekening Belanja Langsung yaitu sebesar 160.477.082.976,00 atau 25 % dari total Belanja Langsung. Kami melihat jumlah anggaran tersebut masih sangat besar dan tidak efisien, sementara Belanja Modal hanya sebesar 276.418.183.442,00 atau 43,5 % dari Belanja Langsung.

Mengingat kebutuhan akan infrastruktur dan sarana prasarana lain masih cukup besar, kami mengharapkan pemerintahan daerah untuk lebih efisien dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Seyogyanya porsi Belanja Modal lebih maksimal. Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kajian tentang proporsi ideal pada rekening Belanja Langsung.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan dan kami mensepakati raperda ini ditetapkan menjadi sebuah peraturan daerah dan dapat dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Amin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 29 November 2016

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Wakil Ketua

SUKARMAIN

Sekretaris

SAHMINGSIH, SE



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Membaca : Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.
- Merimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang diperlukan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
10. Undang - Undang Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
32. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
40. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan :
1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 November 2016.
 2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 November 2016
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 November 2016

MEMUTUSKAN :

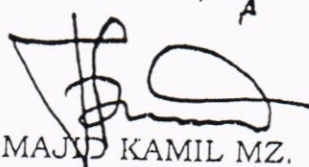
Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 November 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K e t u a ,



H. MAJID KAMIL MZ.

atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan :
1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 November 2016.
 2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 November 2016
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 November 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

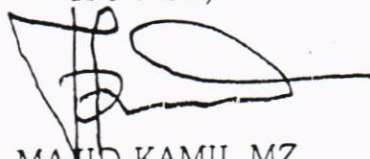
KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini kepada Bupati Rembang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 November 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K e t u a,



H. MAJID KAMIL MZ.



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) beserta pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun dalam jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 29 November 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H. MAJID KAMIL M.Z

Lampiran : Keputusan DPRD Nomor Tahun 2016
 Tentang Program Pembentukan Peraturan
 Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INST ANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	LAMA		NA	Penjelasan atau Keterangan			
1 Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Perubahan Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum		V	Tahun 2018:		Tarif Lama sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini	Dinhubkom info Kab. Rembang	Tahun 2017	Perubahan Tarif dampaknya terhadap peningkatan PAD
2 Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir		V	Tahun 2018:		Tarif Lama sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini	Dinhubkom info Kab. Rembang	Tahun 2017	Perubahan Tarif dampaknya terhadap peningkatan PAD

Rancangan Peraturan Daerah	Pengelolaan Tempat Pemasangan Reklame	Pengelolaan Reklame di Kabupaten Rembang	V			V		DPPKAD DPU Dinhubkom info Inspektorat Satpol PP KPPT		<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi - Reklame - Jenis Media - Jenis Reklan - Tarif - Penertiban
Rancangan Peraturan Daerah	Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Pedoman Persyaratan pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Rembang	V		Tahun 2018	V		Bagian Adm.Pemba ngunan DPU KPPT	Tahun 2017	-
Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang PD.BPR BKK Lasem PD.BKK	Perubahan nominal penyertaan modal pada PD.BPR BKK Lasem		V	Tahun 2017			BUMD se kabupaten Rembang		Perubahan nomina penyertaan modal untuk PD.BPR BKK Lasem mengacu pa Perda PD,BPR BKK Jawa Tengah yang akan dilakukan perubahan di Tahu 2017

		Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah								
6.	Rancangan Peraturan Daerah	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Biaya Retribusi Peralatan UTTP Wajib Tera/Tera Ulang	V		Tahun 2017			Dinperindag kop dan UMKM	
7.	Rancangan Peraturan Daerah	Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL	Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL	V		Tahun 2017			Dinperindag kop dan UMKM	
8.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Perubahan Ketentuan denda keterlambatan pembayaran Lelang		V	Tahun 2017			Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahun 2017
9.	Rancangan Peraturan Daerah	Pelayanan Ibadah Haji		V		Tahun 2017			Bagian Kesra	Tahun 2017

10.	Rancangan Peraturan Daerah	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Rembang		V		Tahun 2017	V		Inisiatif	Tahun 2017	
11.	Rancangan Peraturan Daerah	Pengelolaan aset - aset hasil PNPM Mandiri Perdesaan		V		Tahun 2017			Inisiatif	Tahun 2017	
12.	Rancangan Peraturan Daerah	Perlindungan Petani dan Nelayan Di Kabupaten Rembang		V		Tahun 2017			Inisiatif	Tahun 2017	
13.	Rancangan Peraturan Daerah	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah di Kabupaten Rembang		V		Tahun 2017			Inisiatif	Tahun 2017	

Ditetapkan di: Rembang
Pada tanggal : 29 November 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H. MAJID KAMIL M.Z



BERITA ACARA

NOMOR : 900 /~~2588~~ / 2016
NOMOR : 900 /645/ 2016

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada Hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Sembilan* bulan November *Dua Ribu Enam Belas* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 90 Rembang yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.
2. **H. MAJID KAMIL MZ** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
3. **H. GUNASIH, S. E.** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4. **M. BISRI CHOLIL LAQUF** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. **SUMARSIH** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam berita acara ini;
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

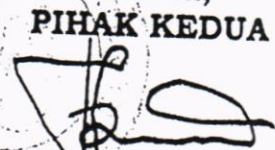
Rembang, 29 November 2016

BUPATI REMBANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. ABDUL HAFIDZ

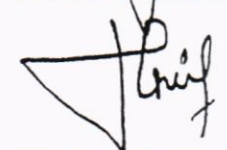
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. MASID KAMIL MZ.
KETUA

H. GUNASIH, S. E.
WAKIL KETUA

M. BISRI CHOLIL LAQUF
WAKIL KETUA



SUMARSIH
WAKIL KETUA



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017
Tanggal, 29 November 2016**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Rembang ;
- Ykh. - Para Asisten Sekda dan Kepala SKPD se
Kab. Rembang ;
- Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur ***Alhamdulillah*** kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna terakhir DPRD, dalam rangka "***Pembahasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017***" dalam keadaan sehat wala'fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini ijinilah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas ketepatan waktu dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Tujuan utama Rancangan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 adalah Memperkuat Sinergitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah untuk Pengembangan Potensi Wilayah, serta pemenuhan Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna Perwujudan Pemerintahan yang Amanah.

Secara berkelanjutan RAPBD ini mampu meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif guna mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Adapun ringkasan RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.554.462.883.456,- (*Satu trilyun lima ratus lima puluh empat milyar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*). Belanja Daerah sebesar Rp.1.738.067.268.368,- (*Satu trilyun tujuh ratus tiga puluh delapan milyar enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*) defisit sebesar Rp. 183.604.384.502,- (*Seratus delapan puluh tiga milyar enam ratus empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua rupiah*) dan ditutup dengan Pembiayaan sebesar Rp.183.604.384.502,- (*Seratus delapan puluh tiga milyar enam ratus empat juta tiga ratus delapan*

puluh empat ribu lima ratus dua rupiah) sehingga postur RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 balance.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 yang telah kita bahas bersama semoga mampu memenuhi harapan dan cita-cita luhur yang telah kita harapkan bersama.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala dukungan dan kerjasama yang baik selama ini. Semoga amal ibadah saudara dan kita semua mendapat imbalan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu Wata'ala. Amin.

Demikian telah saya sampaikan Pendapat Akhir Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017. Dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
memberikan bimbingan dan kemudahan dalam
membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik.
Sekian, terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

fu **H. ABDUL HAFIDZ**

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,